



RENCANA PENGELOLAAN PESISIR TERPADU

KABUPATEN BATANG

2025

RENCANA PENGELOLAAN PESISIR TERPADU **KABUPATEN BATANG** TAHUN 2025

TIM PENYUSUN:

Akhmad Solihin
Retia Revany
Robba Fahrissy Darus
Andy Afandy
Yoppie Christian

TIM TATA LETAK:

Herdinar Novalia Junaika
Cindy Syaza Fhadilla

disusun melalui kerja sama antara



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan.....	5
BAB II ARAH KEBIJAKAN	7
2.1. Keterkaitan dengan Agenda Nasional.....	7
2.2. Keterkaitan dengan Agenda Perencanaan Provinsi Jawa Tengah.....	9
2.3. Keterkaitan dengan Agenda Pembangunan Pengelolaan Kabupaten Batang.....	10
BAB III TUJUAN PENGELOLAAN PESISIR TERPADU	15
3.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.....	15
3.1.1. Pilar 1: Pemeliharaan dan Pemulihan Fungsi Ekosistem Pesisir.....	15
3.1.2. Pilar 2: Strategi Pembangunan Berkelanjutan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir	20
3.1.3. Pilar 3: Penguatan Tata Kelola Pesisir yang Inklusif dan Kolaboratif.....	25
3.1.4. Pilar 4: Peningkatan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	29
3.2. Pemetaan Isu Permasalahan.....	34
3.2.1. Kerusakan Ekosistem Laut dan Pesisir serta Pengelolaan Sumberdaya Alam.....	34
3.2.2. Infrastruktur dan Sanitasi.....	42
3.2.3. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir.....	49
3.2.4. Pengembangan Sosial Masyarakat Pesisir.....	52
3.3. Penilaian berdasarkan <i>State of the Coast</i>	60
BAB IV KELEMBAGAAN	106
BAB V STRATEGI DAN RENCANA KEGIATAN	112
5.1. Sintesis Isu Strategis.....	112
5.2. Rencana Kegiatan	117

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI	167
6.1 Prinsip Pemantauan dan Evaluasi.....	167
6.2 Komponen Pemantauan dan Evaluasi	168
6.3 Rencana Pemantauan dan Evaluasi per Tujuan.....	169



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keselarasan misi dengan pilar rencana pengelolaan pesisir terpadu Kabupaten Batang	12
Gambar 2. Indikator ekologis dan fungsional dalam pemeliharaan dan pemulihan fungsi ekosistem pesisir Kabupaten Batang	16
Gambar 3. Indikator kuantitatif peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir	21
Gambar 4. Indikator berbasis kinerja dan partisipasi penguatan tata kelola pesisir yang inklusif dan kolaboratif	25
Gambar 5. Indikator peningkatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	30
Gambar 6. Peta isu sumber daya pesisir dan lingkungan Kabupaten Batang	35
Gambar 7. Isu prioritas sumber daya pesisir dan lingkungan Kabupaten Batang	38
Gambar 8. Peta isu infrastruktur dan sanitasi Kabupaten Batang	44
Gambar 9. Isu prioritas infrastruktur dan sanitasi Kabupaten Batang	46
Gambar 10. Peta isu sosial ekonomi Kabupaten Batang	54
Gambar 11. Isu prioritas sosial dan ekonomi Kabupaten Batang	56
Gambar 12. Diagram Radar Posisi Antar Elemen Tata Kelola Kabupaten Batang	62
Gambar 13. Diagram Radar Posisi Antar Elemen Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Batang	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks target indikator kunci pemeliharaan dan pemulihan fungsi ekosistem pesisir Kabupaten Batang	17
Tabel 2. Matriks target indikator kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Kabupaten Batang	21
Tabel 3. Matriks target indikator kunci penguatan tata kelola pesisir yang inklusif dan kolaboratif Kabupaten Batang	26
Tabel 4. Skala prioritas isu sumber daya pesisir dan lingkungan Kabupaten Batang	36
Tabel 5. Skala prioritas isu infrastruktur dan sanitasi Kabupaten Batang	44
Tabel 6. Skala prioritas isu sosial dan ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Batang	54
Tabel 7. Matriks Rangkuman Temuan Kunci SOC dan Rekomendasi	65
Tabel 8. Matriks integrasi temuan SOC dengan isu strategis pada RPJMD dan FGD	83
Tabel 9. Struktur Kelompok Kerja Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Kabupaten Batang	106
Tabel 10. Isu strategis berdasarkan kelompok isu besar Kabupaten Batang	114

Tabel 11. Isu-isu Sumber Daya Pesisir dan Lingkungan	119
Tabel 12. Isu-isu Infrastruktur dan Sanitasi	131
Tabel 13. Isu-isu Sosial Ekonomi	150



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara geografis, Kabupaten Batang menempati posisi strategis di pesisir utara Jawa yang dilintasi oleh jalur Pantura sebagai arteri primer. Jalur yang dirintis sejak abad ke-18 ini merupakan salah satu lintasan tertua di Pulau Jawa, yang memberikan keunggulan aksesibilitas bagi wilayah-wilayah yang dilaluinya dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah. Hingga kini, jalur Pantura tetap menjadi simpul utama bagi pergerakan logistik dan mobilitas penduduk. Kondisi ini secara signifikan mendorong perkembangan wilayah Kabupaten Batang, khususnya dalam memperkuat konektivitas ekonomi dan integrasi sosial masyarakat. Tingginya aksesibilitas yang ditawarkan oleh jalur Pantura telah menstimulasi pertumbuhan pusat-pusat kegiatan ekonomi di sepanjang koridor tersebut, mencakup sektor perdagangan, jasa, logistik, hingga pengembangan kawasan industri. Keunggulan ini kian diperkuat oleh keberadaan pelabuhan di pesisir utara Kabupaten Batang yang memantapkan posisi wilayah ini sebagai simpul transportasi regional. Integrasi antara konektivitas darat dan laut ini tidak hanya mendukung sektor perikanan dan distribusi barang, tetapi juga memperluas potensi ekspor produk lokal. Sinergi kedua moda transportasi tersebut memposisikan Kabupaten Batang sebagai wilayah dengan prospek strategis dalam akselerasi pengembangan ekonomi.

Selain aksesibilitas darat yang memadai, Kabupaten Batang juga didukung oleh infrastruktur transportasi laut melalui keberadaan beberapa pelabuhan strategis. Saat ini, Pelabuhan Batang beroperasi sebagai

Pelabuhan Pengumpan Regional. Dalam menjalankan fungsinya, pelabuhan ini melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan dalam jumlah terbatas, serta menjadi simpul pengumpan bagi pelabuhan utama dan pengumpul. Selain itu, fasilitas ini berperan penting sebagai tempat asal dan tujuan distribusi barang, penumpang, maupun angkutan penyeberangan di lingkup provinsi. Guna memperkuat jaringan logistik, Kabupaten Batang didukung oleh beberapa Pelabuhan, antara lain Pelabuhan Roban (Kecamatan Subah), Pelabuhan Celong (Kecamatan Banyuputih), Pelabuhan Seklayu (Kecamatan Gringsing), dan Terminal multipurpose di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis.

Secara morfologis, wilayah Kabupaten Batang terbagi menjadi tiga zona utama, yaitu wilayah bagian utara, tengah, dan selatan. Kawasan utara Kabupaten Batang karakteristiknya didominasi oleh morfologi dataran rendah dan wilayah pesisir. Secara administratif, zona ini mencakup enam kecamatan, meliputi Kecamatan Gringsing, Banyuputih, Subah, Tulis, Kandeman, dan Batang. Mengingat karakteristik fisiknya yang landai dan strategis, bagian utara Kabupaten Batang memiliki prospek pengembangan yang diarahkan sebagai pusat perkotaan serta kawasan industri.

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Batang dianalisis berdasarkan dua indikator utama, yaitu ketinggian dan kemiringan lahan. Wilayah ini memiliki karakteristik relief yang sangat bervariasi, meliputi dataran rendah, dataran tinggi, hingga kawasan perbukitan dengan kontur pegunungan yang berkisar dari landai hingga curam. Selain itu, Kabupaten Batang memiliki keunggulan geografis berupa garis pantai sepanjang 38 km yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Bentang alam pesisir yang luas ini memberikan potensi signifikan bagi pengembangan sektor perikanan laut serta ekonomi maritim secara berkelanjutan.



Kabupaten Batang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang beragam dan potensial sebagai pilar utama pembangunan daerah. Diversitas sumber daya tersebut mencakup berbagai sektor ekonomi strategis, di antaranya pertanian, perikanan, dan pariwisata. Namun, guna mencapai pemanfaatan yang optimal, diperlukan tata kelola yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Penekanan pada aspek kelestarian ekosistem menjadi prasyarat mutlak agar eksploitasi nilai ekonomi tidak mengorbankan daya dukung lingkungan bagi generasi mendatang.

Kabupaten Batang kini juga memegang peran penting dalam peta pembangunan nasional. Penetapan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai proyek strategis nasional telah mengubah wajah pesisir menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru. Keberadaan infrastruktur besar tersebut berpotensi menciptakan efek ganda ekonomi (*multiplier effect*) yang signifikan melalui peningkatan lapangan kerja dan investasi daerah. Namun, transformasi pesisir yang masif ini menimbulkan tekanan baru terhadap daya dukung lingkungan, terutama terhadap ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang menyediakan jasa lingkungan penting, termasuk penyerapan karbon, penyedia habitat, dan perlindungan alami terhadap abrasi serta banjir rob. Selain itu, pembangunan infrastruktur besar tersebut juga memberikan tekanan sosial yang berbeda pada kelompok nelayan kecil, kelompok perempuan dan orang muda pesisir karena adanya perubahan fungsi pesisir yang masif.

Pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Batang masih menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dan saling berkaitan, meskipun memiliki potensi yang besar. Beberapa isu strategis utama antara lain:

1. Konflik Pemanfaatan Ruang. Terjadi kompetisi tajam antara sektor tradisional (perikanan dan pertanian) dengan sektor modern

- (industri, energi, dan pariwisata). Harmonisasi tata ruang pesisir dengan mengakomodir kepentingan para pihak menjadi kunci penting untuk meminimalkan konflik sosial dan ekonomi.
2. Ancaman Perubahan Iklim. Kenaikan muka air laut dan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem memperparah abrasi dan banjir rob, mengancam pemukiman dan lahan tambak produktif.
 3. Ketidakseimbangan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan. Peningkatan investasi industri dan energi harus diimbangi dengan pelaksanaan instrumen lingkungan seperti AMDAL dan penerapan program rehabilitasi ekosistem.
 4. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Lokal. Diperlukan pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, petambak, kelompok perempuan dan orang muda agar mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan sosial-ekonomi serta terlibat aktif dalam proses pembangunan.

Dari seluruh permasalahan tersebut, abrasi pantai muncul sebagai isu paling dominan dan mendesak. Laju abrasi yang tinggi telah menyebabkan hilangnya daratan, rusaknya infrastruktur pesisir, dan ancaman serius terhadap permukiman serta tambak produktif. Penyebabnya bersifat multifaktor, meliputi perubahan hidrodinamika laut, hilangnya vegetasi mangrove dan vegetasi pantai, serta pembangunan struktur pengaman pantai yang kurang tepat. Konversi mangrove secara ekstensif menjadi tambak, permukiman, dan kawasan industri telah menghilangkan fungsi ekologis mangrove sebagai sabuk hijau (*green belt*) yang menahan gelombang, menjaga kestabilan garis pantai, dan habitat berbagai biota dan ekosistem pendukung sumber pangan.



Menjawab tantangan-tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang telah mengambil langkah progresif dengan mengadopsi pendekatan Manajemen Pesisir Terpadu atau *Integrated Coastal Management (ICM)* sebagai pilar utama pengelolaan wilayah pesisir. Pendekatan ICM menekankan pentingnya keterpaduan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas aktor dalam mengelola sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, pembangunan pesisir Batang diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian ekologi, dan kesejahteraan sosial masyarakat pesisir. Dengan demikian, Rencana Pengelolaan Pesisir Terpadu Kabupaten Batang hadir sebagai dokumen strategis yang memetakan potensi, permasalahan, serta arah pengelolaan pesisir secara terintegrasi menuju wilayah pesisir yang tangguh, adaptif, inklusif dan berkelanjutan.

1.2. Tujuan Penyusunan

Tujuan fundamental dari penyusunan Rencana Pengelolaan Pesisir Terpadu Kabupaten Batang adalah untuk menyediakan kerangka kerja fasilitatif yang sistematis guna mensintesis dan mengkoordinasikan isu, program, dan inisiatif dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan demikian, pembangunan pesisir dapat diarahkan secara lebih terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.

Dokumen ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau menambah rencana strategis yang sudah ada, melainkan berfungsi sebagai instrumen harmonisasi yang memetakan, mensinergikan, dan memastikan program-program eksisting berorientasi pada efikasi dalam menjawab permasalahan pesisir yang krusial.

Secara lebih rinci, rencana pengelolaan pesisir terpadu ini memiliki tujuan sebagai berikut:



1. **Mengidentifikasi Isu Strategis:** Bertindak sebagai instrumen kajian komprehensif untuk memetakan kondisi eksisting dan mengidentifikasi isu-isu kritis, termasuk tantangan degradasi ekosistem, konflik pemanfaatan ruang, kerentanan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana pesisir yang memiliki dampak berbeda bagi masyarakat pesisir terutama kelompok perempuan, orang muda, nelayan kecil dan kelompok rentan lainnya.
2. **Menginventarisasi Program Lintas Sektor:** Mengkompilasi dan memetakan program pembangunan pesisir dari setiap OPD guna mengidentifikasi keterhubungan, duplikasi, dan kesenjangan (*gap*) dalam perencanaan dan implementasi.
3. **Mensinergikan dan Mengkoordinasikan Program:** Mengintegrasikan program-program yang tersebar di berbagai instansi ke dalam kerangka kerja yang utuh, sehingga dapat tercipta efisiensi alokasi sumber daya, konsistensi kebijakan, dan peningkatan dampak nyata bagi masyarakat pesisir terutama kelompok perempuan, orang muda, nelayan kecil dan kelompok rentan lainnya.
4. **Menjadi Landasan Usulan Program:** Menyediakan dasar yang berbasis ilmiah untuk merumuskan usulan program baru yang relevan, terutama untuk mengatasi isu-isu strategis yang belum terakomodasi dalam rencana atau program OPD yang ada.
5. **Menjamin Koordinasi Lintas Sektor dan Level:** Berfungsi sebagai mekanisme koordinasi yang memastikan program pembangunan pesisir selaras dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi, serta konsisten dengan dokumen perencanaan daerah lainnya (misalnya, RPJMD dan RTRW).



BAB II

ARAH KEBIJAKAN

2.1. Keterkaitan dengan Agenda Nasional

Pada tingkat nasional, arah kebijakan pengelolaan pesisir Batang selaras dengan beberapa dokumen perencanaan utama:

- RPJPN 2025–2045 (Visi Indonesia Emas 2045) menempatkan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi biru sebagai salah satu pilar penting untuk mencapai kedaulatan pangan, energi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pengelolaan pesisir Batang dapat berkontribusi terhadap penguatan sektor perikanan berkelanjutan, konservasi ekosistem pesisir, dan pengembangan pariwisata bahari berbasis komunitas yang ramah lingkungan. Dengan kata lain, Batang dapat menjadi salah satu simpul penting dalam mendukung visi Indonesia Emas yang menekankan keberlanjutan dan inklusivitas.
- RPJMN 2025–2029 sebagai dokumen teknokratis pembangunan nasional lima tahunan menekankan agenda penguatan ketahanan lingkungan, adaptasi perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon. Arah ini sangat relevan dengan kondisi Batang, yang menghadapi ancaman nyata berupa abrasi, banjir rob, degradasi mangrove, serta tekanan terhadap ekosistem laut. Program rehabilitasi pesisir, penguatan sistem peringatan dini bencana, serta diversifikasi ekonomi pesisir yang ramah lingkungan menjadi bentuk kontribusi Batang terhadap pencapaian agenda RPJMN.
- Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan wilayah pesisir Batang,

khususnya pada Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), Tujuan 14 (Ekosistem Laut), dan Tujuan 15 (Ekosistem Daratan). Berbagai inisiatif seperti rehabilitasi mangrove, pengendalian pencemaran laut, dan pemberdayaan masyarakat pesisir mencerminkan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan tersebut. Selain itu, penerapan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial (SDG 5) juga menjadi aspek penting, mengingat kelompok perempuan, orang muda, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya di pesisir sering berada dalam posisi rentan dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya, serta partisipasi dalam pembangunan. Pengentasan kemiskinan sebagaimana menjadi mandat dalam SDG 1 juga memiliki keterkaitan langsung pada pengelolaan pesisir Batang, diantaranya untuk menjawab kebutuhan kebutuhan layanan dasar bagi masyarakat dan strategi pengembangan ekonomi berbasis potensi pesisir. Selain itu, pengelolaan pesisir sesuai dengan mandat SDG 2 yaitu mewujudkan dunia tanpa kelaparan.

- Agenda *Net Zero Emission* 2060 dan pembangunan rendah karbon nasional juga terkait erat dengan potensi ekosistem pesisir Batang. Mangrove merupakan penyerap karbon alami (*blue carbon*) yang perannya sangat signifikan dalam mitigasi perubahan iklim. Dengan demikian, pengelolaan pesisir Batang yang selaras dengan agenda ini dapat membuka peluang pembiayaan inovatif seperti perdagangan karbon biru atau skema pembayaran jasa ekosistem yang mendukung pembangunan daerah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.



2.2. Keterkaitan dengan Agenda Perencanaan Provinsi Jawa Tengah

Di tingkat provinsi, arah kebijakan pesisir Batang juga harus selaras dengan dokumen perencanaan Jawa Tengah:

- RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 menetapkan visi pembangunan *"Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan"*, sedangkan visi RPJMD Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah *"Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045"*. Dalam visi tersebut, aspek berkelanjutan, artinya Provinsi Jawa Tengah berkomitmen menjaga dan melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana. Sehingga, Provinsi Jawa Tengah dapat menjaga kesejahteraan sumberdaya alam dan lingkungan serta ketahanan terhadap resiko bencana. Hal ini selaras dengan tujuan dari Visi RPJMD Kabupaten Batang antara lain meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah merupakan dokumen strategis yang mengatur peruntukan ruang laut, termasuk untuk kawasan konservasi, perikanan, pariwisata, alur pelayaran, dan kegiatan lainnya. Rencana Pengelolaan Pesisir Terpadu Kabupaten Batang harus konsisten dengan RTRW ini yang mana telah terintegrasi dengan RZWP3K sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, RZWP3K diintegrasikan ke dalam RTRW provinsi. Menghindari terjadinya konflik pemanfaatan ruang laut maka penyesuaian dengan RTRW sangat diperlukan. RTRW Provinsi menetapkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Industri, Kabupaten Batang menjadi KSP industri prioritas provinsi dan industri maritim. KSP berdasarkan sudut pandang

kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, Kabupaten Batang menjadi wilayah KSP rawan rob dan penurunan muka tanah.

- Program Strategis Provinsi seperti *Jateng Green* dan *Jateng Resilience* menekankan transisi menuju pembangunan hijau dan penguatan ketahanan wilayah terhadap bencana. Arah kebijakan ini dapat diimplementasikan di Batang melalui upaya rehabilitasi mangrove untuk mengurangi risiko abrasi, pengembangan energi ramah lingkungan di kawasan pesisir, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim.
- *State of the Coast Jawa Tengah*, berfungsi sebagai landasan diagnostik yang mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam aspek tata kelola dan kondisi lingkungan. Dokumen ini menghasilkan output lanjutan baik dalam kerangka manajemen pengetahuan maupun penentuan aksi-aksi yang bersifat operasional yang akan menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan pesisir maupun pemangku kepentingan terkait lainnya.

2.3. Keterkaitan dengan Agenda Pembangunan Pengelolaan Kabupaten Batang

Arah kebijakan Pembangunan pengelolaan pesisir Kabupaten Batang selaras dengan RPJMD Kabupaten Batang 2025-2029, dengan mengusung visi "Terwujudnya Kabupaten Batang yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Indonesia Emas 2045", dan mengusung *tagline* "Clean Industrial City" bermakna keseimbangan antara tiga dimensi utama pembangunan: kemajuan industri, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial-ekonomi komunitas lokal. Filosofi ini merespon tantangan pesatnya

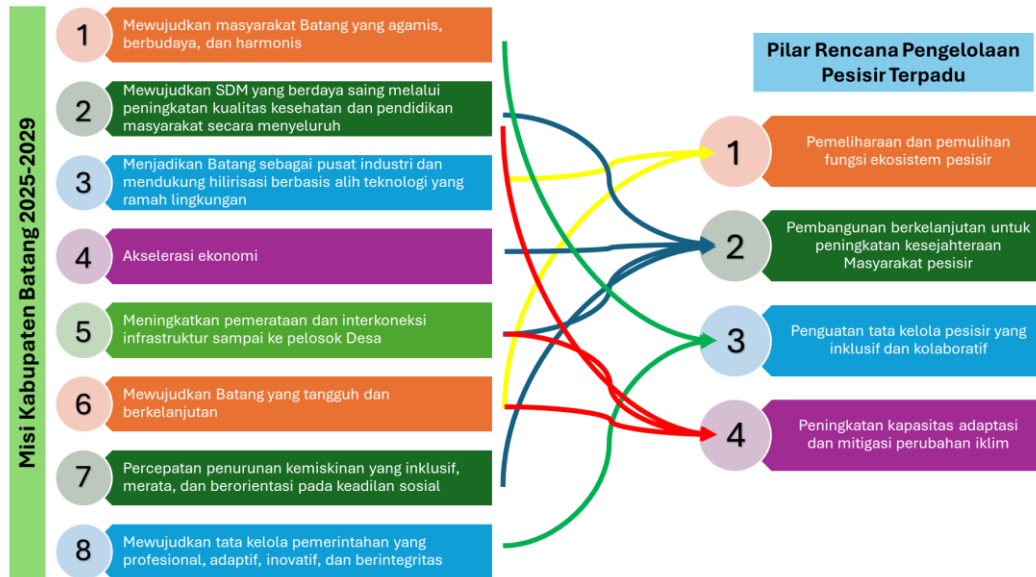


pertumbuhan kawasan industri yang tidak hanya membawa potensi ekonomi, tetapi juga risiko sosial dan ekologis.

Kebijakan penataan ruang dari RTRW Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 yang selaras dengan dokumen rencana pengelolaan pesisir terpadu antara lain pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan industri berkualitas, pengembangan fasilitas perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan, pengembangan destinasi wisata unggulan kabupaten, dan peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan lindung, peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana. Beberapa strategi penataan ruang kawasan peruntukan industri adalah mengembangkan kawasan peruntukan industri di kawasan koridor jalan pantai utara (Pantura) dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri. Empat strategi penataan ruang pengembangan fasilitas perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan antara lain (1) mengembangkan pelabuhan perikanan, (2) mengembangkan fasilitas pengolahan hasil perikanan, (3) mengembangkan kawasan minapolitan, dan (4) mengembangkan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Strategi penataan kawasan rawan bencana antara lain (1) membatasi pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya terutama untuk fungsi permukiman dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana, (2) mengembangkan sistem peringatan dini, (3) mengembangkan jalur evakuasi bencana, (4) mengembangkan ruang evakuasi bencana, (5) mengembangkan tempat relokasi pascabencana berupa hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), dan (6) melestarikan kawasan peruntukan lindung dan mempertahankan kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air.



Melalui pendekatan yang transformatif dan kolaboratif, konsep ini menekankan bahwa industri bukan hanya pelaku pertumbuhan tetapi juga mitra dalam menciptakan kota yang bersih, sehat, dan membahagiakan.



Gambar 1. Keselarasan misi dengan pilar rencana pengelolaan pesisir terpadu Kabupaten Batang

Bentuk penjabaran visi dan misi pembangunan daerah, pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Batang diarahkan melalui empat pilar strategis yang terintegrasi. Berdasarkan RPJMD Kab Batang, visi dan misi pengelolaan kawasan pesisir diterjemahkan dari 8 misi umum RPJMD dan disarikan menjadi 4 pilar yang strategis dan terintegrasi yang relevan dengan tantangan dan potensi unik di wilayah pesisir untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing. (Gambar 1).

1. Pemeliharaan dan Pemulihan Fungsi Ekosistem Pesisir

Pilar ini berfokus pada perlindungan dan pemulihan aset ekologis utama kawasan pesisir sebagai fondasi keberlanjutan. Upaya ini merupakan implementasi langsung dari Misi 6 (Mewujudkan Batang yang Tangguh dan Berkelanjutan) yang menekankan mitigasi risiko dampak lingkungan serta

didukung oleh Misi 3 (Menjadikan Batang sebagai pusat industri yang ramah lingkungan).

2. Strategi Pembangunan Berkelanjutan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Pilar ini merupakan inti dari upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir. Pilar ini mengintegrasikan Misi 2 (SDM Berdaya Saing), Misi 4 (Akselerasi Ekonomi), Misi 5 (Pemerataan Infrastruktur), dan Misi 7 (Percepatan Penurunan Kemiskinan).

3. Penguatan Tata Kelola Pesisir yang Inklusif dan Kolaboratif

Tata kelola yang efektif adalah kunci keberhasilan pengelolaan pesisir. Pilar ini menerjemahkan Misi 8 (Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Adaptif, dan Berintegritas) serta diperkuat oleh nilai-nilai dari Misi 1 (Mewujudkan Masyarakat Batang yang Agamis, Berbudaya dan Harmonis).

4. Peningkatan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Pesisir adalah wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pilar ini secara khusus mengimplementasikan Misi 6 (Mewujudkan Batang yang Tangguh dan Berkelanjutan) dengan dukungan teknis dari Misi 2 (SDM) dan Misi 5 (Infrastruktur).



BAB III

TUJUAN PENGELOLAAN PESISIR TERPADU

Tujuan pengelolaan pesisir terpadu dirangkum dari beberapa dokumen, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), *State of the Coast* (SOC), dan pemetaan isu dari kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Kabupaten Batang.

3.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Harmonisasi RPJMD dengan rencana pengelolaan pesisir terpadu menjadi dasar tujuan pengelolaan pesisir terpadu. Tujuan pengelolaan pesisir terpadu ini merupakan bentuk implementasi visi Kabupaten Batang yaitu terwujudnya Kabupaten Batang yang mandiri dan berdaya saing menuju Indonesia emas 2045.

3.1.1. Pilar 1: Pemeliharaan dan Pemulihan Fungsi Ekosistem Pesisir

Tujuan utama pilar 1 pengelolaan kawasan pesisir adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui penguatan fungsi ekologis pesisir sebagai habitat produktif dan pelindung alami wilayah pantai. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilaksanakan rehabilitasi dan pengelolaan mangrove secara terencana dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pengendalian kerusakan lingkungan, pengurangan risiko bencana, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Pengelolaan ini berperan penting dalam memperkuat ketahanan sumber daya perikanan sebagai sumber pangan berkelanjutan, melindungi wilayah pesisir dari abrasi dan dampak hidrometeorologis, serta mendukung pembangunan ekonomi lokal yang seimbang dengan pelestarian lingkungan. Sasaran pengelolaan diarahkan pada terwujudnya ekosistem pesisir yang sehat dan tangguh,

didukung oleh peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, sebagai fondasi bagi kualitas hidup, keamanan lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Batang.



Gambar 2. Indikator ekologis dan fungsional dalam pemeliharaan dan pemulihan fungsi ekosistem pesisir Kabupaten Batang

Keberhasilan tujuan ini sangat didukung dengan penguatan kelembagaan merupakan sasaran kunci dalam rencana pengelolaan pesisir Kabupaten Batang. Hal ini mencakup pembentukan sistem tata kelola yang responsif, transparan, dan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi. Fokus utamanya adalah pembentukan forum koordinasi terintegrasi, pengembangan regulasi lokal yang adaptif, dan implementasi mekanisme pengawasan partisipatif. Keberhasilan program ini akan diukur melalui beberapa indikator termasuk terbentuknya minimal tiga forum koordinasi yang aktif, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi pesisir, dan kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses pengelolaan. Partisipasi

masyarakat yang lebih besar dalam pengambilan keputusan akan menjadi bukti nyata keberhasilan tata kelola.

Keberhasilan program pemulihan dan pemeliharaan fungsi ekosistem pesisir di Kabupaten Batang periode 2025–2029 berfokus pada kelestarian lingkungan dan penataan ruang:

Tabel 1. Matriks target indikator kunci pemeliharaan dan pemulihan fungsi ekosistem pesisir Kabupaten Batang

Kategori Indikator	Indikator Kunci	Target
Fisik Pesisir	Berkurangnya laju abrasi di lokasi prioritas.	Pengurangan laju abrasi tahunan
	Meningkatnya stabilitas garis pantai.	Terjaganya garis pantai di zona lindung dari kemunduran lebih lanjut.
Kualitas Lingkungan	Meningkatnya kualitas air laut.	Indeks Kualitas Air (IKA) Laut berada pada status "Baik".
	Terkendalinya sedimentasi di muara sungai.	Laju pendangkalan di muara-muara utama berkurang
Ekologis	Bertambahnya luasan tutupan mangrove.	Penambahan tutupan mangrove berkualitas baik.
	Meningkatnya indeks keanekaragaman hayati.	Peningkatan indeks keanekaragaman hayati di zona rehabilitasi

Keterkaitan dengan Strategi dan Program RPJMD Kabupaten Batang 2025-2029

Implementasi program rehabilitasi ekosistem pesisir ini tidak hanya berdiri sendiri, tetapi terintegrasi secara erat dengan strategi yang lebih luas, seperti zonasi wilayah pesisir yang telah ditetapkan dan program edukasi

konservasi yang ditargetkan untuk masyarakat lokal. Strategi utamanya melibatkan pendekatan berbasis masyarakat (*community-based management*), memastikan kegiatan penanaman dan pemeliharaan mangrove dilakukan melalui kolaborasi aktif dengan kelompok nelayan (perempuan dan laki-laki), orang muda, dan kelompok sadar wisata. Selain itu, pemantauan kualitas air dan kesehatan biota secara berkala oleh tim ahli akan menjadi bagian integral dari program untuk memastikan efektivitas rehabilitasi dan memberikan data yang diperlukan untuk penyesuaian kebijakan adaptif. Keterkaitan ini menjamin program pemulihan bersifat holistik dan berkelanjutan, didukung oleh ilmu pengetahuan dan kepemilikan lokal.

Keterkaitan dengan Misi: Meningkatkan Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup serta Kualitas Infrastruktur.

- Strategi: Mitigasi bencana berbasis ekosistem dan pengendalian pencemaran lingkungan.
- Program Terkait:
 1. **Pembangunan Sabuk Pantai Hijau (*Green Belt*)**: Rehabilitasi dan penanaman mangrove serta vegetasi pantai endemik secara sistematis untuk membentuk penghalang alami (*barrier*) yang mampu meredam energi gelombang dan menahan sedimen.
 2. **Penerapan Rekayasa Hibrida (*Hybrid Engineering*)**: Mengintegrasikan struktur fisik ramah lingkungan (misalnya *permeable dam*, *groin* ambang rendah) dengan revegetasi untuk mempercepat stabilisasi pantai di area dengan laju abrasi sangat tinggi.



3. **Program Pemantauan Kualitas Air:** Membuat sistem monitoring kualitas air secara berkala di titik-titik kritis, terutama di sekitar muara sungai dan zona industri untuk deteksi dini pencemaran.

Keterkaitan dengan Misi: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Penataan Ruang.

- **Strategi:** Penguatan regulasi dan penegakan hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir.
- **Program Terkait:**
 1. Revisi dan Implementasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K): Memastikan peruntukan lahan di pesisir sesuai dengan daya dukung lingkungannya, menetapkan zona sempadan pantai yang tegas, dan zona konservasi mangrove.
 2. Pengawasan Lingkungan Terpadu: Melakukan pengawasan ketat terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi industri di kawasan pesisir untuk memastikan pengelolaan limbah sesuai baku mutu.

Implementasi program ini diharapkan menghasilkan dampak positif yang terfokus pada pemulihan kondisi biofisik kawasan pesisir.

- **Dampak Fisik:**
 - Stabilnya Garis Pantai: Berkurangnya laju kehilangan daratan akibat abrasi, sehingga melindungi aset infrastruktur vital (jalan, jembatan) yang berada di dekat pantai.
 - Perbaikan Proses Sedimentasi: Ekosistem mangrove yang pulih akan berfungsi sebagai pemerangkap sedimen alami,

membantu mengurangi pendangkalan di muara sungai dan alur pelayaran.

- Reduksi Energi Gelombang: Sabuk hijau pesisir akan secara signifikan mengurangi energi gelombang yang mencapai daratan, terutama saat terjadi badai atau pasang tinggi.

- **Dampak Ekologis:**

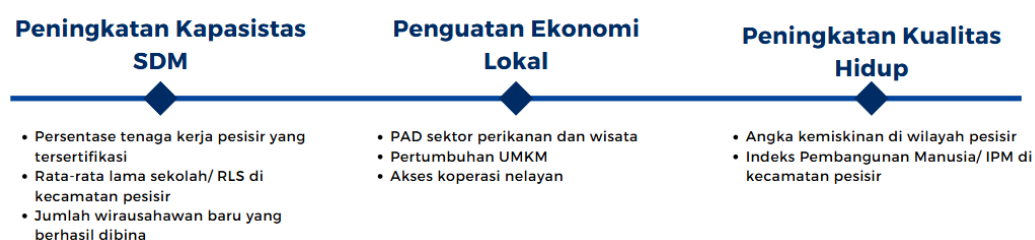
- Pemulihan Habitat Kunci: Terciptanya kembali ekosistem mangrove yang sehat sebagai area pemijahan (*spawning ground*), pembesaran (*nursery ground*), dan mencari makan (*feeding ground*) bagi berbagai biota laut.
- Peningkatan Keanekaragaman Hayati: Kembalinya populasi fauna khas pesisir, seperti berbagai jenis burung air, kepiting, ikan, dan biota lainnya yang bergantung pada ekosistem mangrove dan estuari.
- Peningkatan Fungsi Ekosistem: Meningkatnya kemampuan ekosistem dalam menyerap karbon (mitigasi perubahan iklim) dan menyaring polutan alami sebelum masuk ke laut.

3.1.2. Pilar 2: Strategi Pembangunan Berkelanjutan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir Kabupaten Batang adalah pilar utama dalam struktur sosial dan ekonomi lokal, dengan modal sosial dan budaya yang kuat serta potensi sumber daya manusia yang besar. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Batang merupakan prioritas strategis, mengingat tingginya kerentanan sosial-ekonomi yang dihadapkan pada tantangan ekologis seperti banjir rob dan abrasi serta keterbatasan diversifikasi mata pencaharian.



Data menunjukkan bahwa di beberapa wilayah pesisir, tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, dan mayoritas masyarakat, khususnya nelayan, memiliki tingkat pendapatan yang fluktuatif serta bergantung pada hasil laut. Oleh karena itu, sasaran pembangunan berfokus pada transformasi struktur ekonomi masyarakat pesisir dari subsisten tradisional menjadi ekonomi maritim yang inovatif dan berkelanjutan, didukung oleh penguatan modal manusia (SDM) dan aset fisik yang tahan terhadap bencana.



Gambar 3. Indikator kuantitatif peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir

Keberhasilan program peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Batang dalam kurun waktu 2025-2029 akan diukur melalui indikator kuantitatif sebagai berikut.

Tabel 2. Matriks target indikator kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Kabupaten Batang

Kategori Indikator	Indikator Kunci	Target
Peningkatan Kapasitas SDM	Persentase tenaga kerja pesisir yang tersertifikasi.	Peningkatan tenaga kerja di bidang pengolahan ikan, pariwisata, dan wirausaha.
	Rata-rata lama sekolah (RLS) di kecamatan pesisir.	RLS mencapai atau melampaui rata-rata kabupaten.

Kategori Indikator	Indikator Kunci	Target
	Jumlah wirausahawan baru yang berhasil dibina.	Terciptanya wirausahawan baru di sektor non-perikanan tangkap.
Penguatan Ekonomi Lokal	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pesisir.	Kenaikan kontribusi dari sektor terkait.
	Tingkat pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pengolahan hasil laut dan jasa.	Pertumbuhan jumlah UMKM.
	Persentase keluarga nelayan yang memiliki akses ke lembaga keuangan formal (perbankan/koperasi).	Peningkatan akses.
Peningkatan Kualitas Hidup	Angka kemiskinan di wilayah pesisir.	Penurunan angka kemiskinan.
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kecamatan pesisir.	IPM kecamatan pesisir setara dengan IPM rata-rata kabupaten.

Keterkaitan dengan strategi dan program RPJMD Kabupaten Batang 2025-2029

Program peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir terintegrasi secara eksplisit dalam kerangka RPJMD Kabupaten Batang 2025-2029, khususnya pada Misi dan Tujuan yang selaras dan mendukung pencapaian misi utama RPJMD yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi kerakyatan.



Keterkaitan dengan Misi: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial.

- **Strategi:** Peningkatan kapasitas dan daya saing tenaga kerja serta pemberdayaan kelembagaan masyarakat.
- **Program Terkait:**
 1. Balai Latihan Kerja (BLK) Pesisir: Menyelenggarakan pelatihan vokasional yang relevan seperti teknik pengolahan ikan modern, manajemen *homestay*, pemandu wisata, dan pemasaran digital.
 2. Program Beasiswa Pesisir: Memberikan akses pendidikan tinggi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di wilayah pesisir untuk menciptakan generasi unggul.
 3. Penguatan Koperasi Unit Desa (KUD) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE): Revitalisasi koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi, mulai dari penyediaan input, pengolahan, hingga pemasaran bersama.

Keterkaitan dengan Misi: Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Inklusif.

- **Strategi:** Diversifikasi ekonomi, pengembangan UMKM, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.
- **Program Terkait:**
 1. Pengembangan Sentra Ekonomi Pesisir Terpadu: Membangun pusat kuliner, pusat oleh-oleh, dan pasar ikan modern yang higienis di lokasi strategis untuk menjadi daya tarik wisata.
 2. Fasilitasi Akses Permodalan: Menghubungkan UMKM pesisir dengan sumber-sumber pembiayaan seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), dana bergulir, dan *fintech*.

3. Inkubasi Bisnis dan Branding Produk Lokal: Memberikan pendampingan intensif bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, desain kemasan, dan strategi pemasaran agar mampu menembus pasar yang lebih luas.

Implementasi program yang fokus pada aspek sosial-ekonomi ini diharapkan membawa dampak transformatif bagi masyarakat pesisir.

- **Dampak Ekonomi:**

- Peningkatan Pendapatan dan Stabilitas Keuangan: Rumah tangga pesisir memiliki sumber pendapatan yang lebih beragam dan tidak lagi bergantung pada satu sektor sehingga lebih stabil secara finansial.
- Terciptanya Lapangan Kerja Baru: Diversifikasi usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan industri pengolahan akan menyerap banyak tenaga kerja lokal.
- Tumbuhnya Perekonomian Lokal: Meningkatnya perputaran uang di dalam komunitas pesisir yang memicu efek ganda (*multiplier effect*) pada sektor-sektor pendukung lainnya.

- **Dampak Sosial:**

- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Terciptanya angkatan kerja yang lebih terampil, berpendidikan, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
- Meningkatnya Kemandirian dan Jiwa Wirausaha: Masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menciptakan peluang ekonomi dan tidak hanya menunggu bantuan.
- Peningkatan Kualitas Hidup Secara Menyeluruh: Dengan pendapatan yang lebih baik dan akses yang lebih mudah ke pendidikan dan layanan kesehatan, tingkat kesejahteraan, dan



Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat secara signifikan.

3.1.3. Pilar 3: Penguatan Tata Kelola Pesisir yang Inklusif dan Kolaboratif

Tata kelola pesisir yang efektif di Kabupaten Batang memerlukan pergeseran paradigma dari manajemen sektoral terpusat menuju model inklusif dan kolaboratif (*co-management*). Wilayah pesisir Batang menghadapi isu multidimensi, seperti abrasi, banjir rob, penurunan permukaan tanah, dan kepadatan penduduk yang berimplikasi pada kompleksitas pengambilan keputusan dan tingginya potensi konflik kepentingan antara sektor industri, masyarakat nelayan, dan konservasi.

Penguatan tata kelola ini bertujuan untuk membentuk sistem pengambilan keputusan yang responsif, transparan, dan berkeadilan dengan memastikan representasi dan partisipasi setara dari seluruh pemangku kepentingan terutama kelompok masyarakat rentan di kawasan pesisir dalam perumusan kebijakan, implementasi program, dan pengawasan. Hal ini sejalan dengan misi utama dalam RPJMD 2025-2029 untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Gambar 4. Indikator berbasis kinerja dan partisipasi penguatan tata kelola pesisir yang inklusif dan kolaboratif

Keberhasilan penguatan tata kelola pesisir di Kabupaten Batang periode 2025–2029 akan diukur melalui indikator berbasis kinerja dan partisipasi:

Tabel 3. Matriks target indikator kunci penguatan tata kelola pesisir yang inklusif dan kolaboratif Kabupaten Batang

Kategori Indikator	Indikator Kunci	Target (Baseline RPJMD 2025-2029)
Kelembagaan & Koordinasi	Terbentuk dan berfungsinya Forum Koordinasi Pesisir Lintas Sektor.	Forum menyelenggarakan rapat koordinasi minimal per triwulan dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang terukur.
	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama antar-dinas terkait.	SOP bersama (misal: perizinan, pengawasan, penataan ruang) disahkan dan diimplementasikan.
Regulasi & Kebijakan	Tingkat sinkronisasi peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati (Perbup) terkait pesisir.	Teridentifikasi dan terharmonisasi peraturan yang tumpang tindih atau tidak relevan.
Sistem Informasi & Transparansi	Beroperasinya sistem basis data pesisir terpadu.	Sistem informasi dapat diakses publik, memuat data perizinan, peta zonasi, dan regulasi terkini.
Mekanisme Partisipatif	Adanya saluran formal untuk pengaduan dan resolusi konflik.	Terbentuknya unit layanan pengaduan tata kelola pesisir yang terintegrasi dengan sistem yang ada.

Keterkaitan dengan strategi dan program RPJMD Kabupaten Batang 2025-2029

Inisiatif penguatan tata kelola ini selaras secara vertikal dan horizontal dengan RPJMD Kabupaten Batang 2025–2029 terutama dalam mendukung Misi yang berfokus pada Tata Kelola Pemerintahan dan Ketahanan Lingkungan.

Inisiatif ini secara langsung mendukung misi RPJMD yang paling fundamental yaitu perbaikan sistem pemerintahan itu sendiri.

Keterkaitan dengan Misi: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, dan Akuntabel.

- **Strategi:** Reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan, dan penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
- **Program Terkait:**
 1. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Sinkronisasi Regulasi Pesisir: Sebuah tim khusus yang terdiri dari Bagian Hukum, Bappeda, DPMPTSP, dan dinas teknis terkait untuk memetakan, mengevaluasi, dan merekomendasikan harmonisasi seluruh produk hukum daerah yang menyangkut wilayah pesisir.
 2. Pengembangan Platform *E-Governance* "Pesisir Batang Terpadu": Membangun portal digital tunggal yang mengintegrasikan layanan informasi perizinan, data spasial, dokumen perencanaan, dan regulasi pesisir. Platform ini menjadi wujud transparansi dan mempermudah koordinasi.
 3. Penguatan Forum Lintas Sektor sebagai Mitra Strategis Pemerintah: Menetapkan forum koordinasi pesisir (yang melibatkan akademisi, pakar, dan perwakilan sektor swasta)

sebagai lembaga penasihat resmi bagi Bupati dalam perumusan kebijakan strategis terkait tata ruang dan investasi di wilayah pesisir.

Dampak dari implementasi program ini terfokus pada perbaikan kinerja dan efektivitas sistem birokrasi dan administrasi pemerintahan.

- **Dampak pada Proses Birokrasi:**

- Efisiensi Pengambilan Keputusan: Alur komando dan koordinasi yang jelas mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan strategis.
- Koherensi Kebijakan: Program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh satu dinas akan selaras dengan dinas lainnya, menghindari program yang kontradiktif.
- Peningkatan Akuntabilitas Kinerja: Peran dan tanggung jawab setiap instansi menjadi jelas, sehingga evaluasi kinerja menjadi lebih mudah dan objektif.

- **Dampak pada Pelayanan dan Administrasi Publik:**

- Adanya Kepastian Hukum: Para pemangku kepentingan, termasuk investor dan organisasi non-pemerintah, mendapatkan kepastian hukum dari regulasi yang tidak lagi ambigu atau tumpang tindih.
- Peningkatan Transparansi: Keterbukaan informasi melalui platform digital mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
- Penurunan Potensi Konflik Administratif: Dengan adanya mekanisme yang jelas untuk partisipasi dan penanganan keluhan, potensi sengketa antar-lembaga atau antara

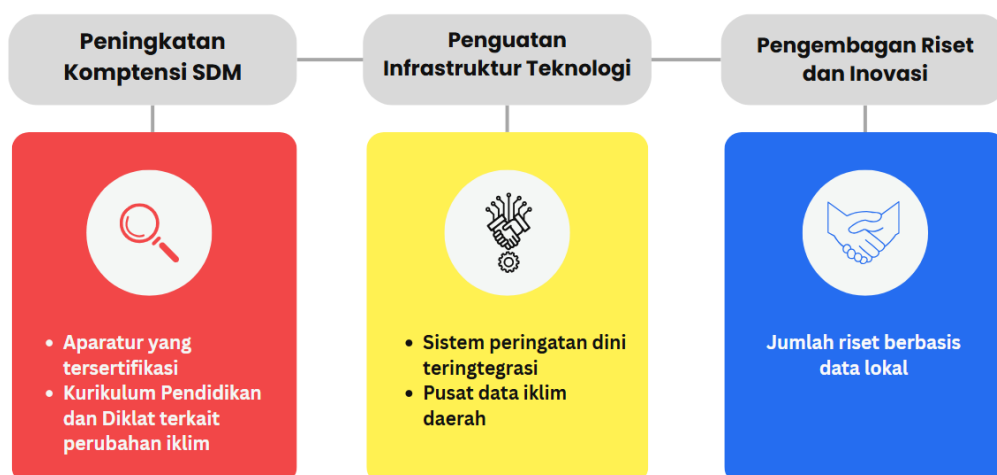


pemerintah dengan pemangku kepentingan dapat diminimalkan.

3.1.4. Pilar 4: Peningkatan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Kabupaten Batang, dengan karakteristik geografis sebagai dataran rendah pesisir dan kini berfungsi sebagai episentrum pertumbuhan industri nasional, dihadapkan pada keniscayaan risiko iklim yang semakin nyata. Dampak utama yang menjadi perhatian mencakup kenaikan muka air laut, banjir rob, dan peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi.

Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan, peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi menjadi prasyarat mutlak untuk mentransformasi wilayah menjadi Kabupaten yang Berketahanan Iklim. Upaya ini diwujudkan melalui strategi adaptasi guna mereduksi potensi kerugian aset dan sosial, serta strategi mitigasi yang efektif untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan selaras dengan agenda penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Fokus implementasi diletakkan pada tiga area intervensi utama: penguatan sistem infrastruktur hijau-biru yang berwawasan lingkungan, pengembangan sistem peringatan dini berbasis teknologi, dan internalisasi kebijakan iklim secara lintas sektoral dalam setiap tahapan pembangunan daerah.



Gambar 5. Indikator peningkatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Keberhasilan program peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Kabupaten Batang periode 2025–2029 akan diukur berdasarkan parameter lingkungan dan kelembagaan:

Tabel 4. Matriks target indikator peningkatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Kabupaten Batang

Kategori Indikator	Indikator Kunci	Target
Peningkatan Kompetensi SDM	Jumlah aparatur (ASN) yang memiliki sertifikasi di bidang analisis risiko iklim atau sejenisnya.	Terdapat aparatur dari dinas-dinas teknis terkait tersertifikasi.
	Terintegrasinya materi perubahan iklim ke dalam kurikulum Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) daerah.	Tersusun dan diimplementasikannya modul Diklat PIM/Teknis tentang kesadaran iklim.
Penguatan Infrastruktur Teknologi	Tingkat operasionalisasi Sistem Peringatan Dini (<i>Early Warning System</i>) terintegrasi.	Sistem beroperasi dengan protokol diseminasi informasi yang teruji.

Kategori Indikator	Indikator Kunci	Target
	Ketersediaan dan fungsionalitas pusat data iklim daerah (<i>local climate data center</i>).	Pusat data terbentuk, dengan pembaruan data setidaknya per semester.
Pengembangan Riset & Inovasi	Jumlah kajian atau riset terapan berbasis data lokal yang dihasilkan melalui kemitraan.	Terdapat kajian proyeksi iklim atau inovasi adaptasi teknologi dipublikasikan.

Keterkaitan dengan strategi dan program RPJMD Kabupaten Batang 2025-2029

Program peningkatan kapasitas ini merupakan pilar fundamental dalam mencapai Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Batang, selaras erat dengan Misi dan Tujuan yang berfokus pada kualitas lingkungan dan ketahanan kota.

Keterkaitan dengan Misi 1: Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan.

- **Strategi:** Pengembangan ekonomi biru (blue economy) melalui sektor perikanan dan pariwisata.
- **Program Terkait:**
 1. Rehabilitasi Mangrove dan Terumbu Karang: Ekosistem yang sehat menjadi *nursery ground* bagi ikan dan biota laut, sehingga secara langsung meningkatkan hasil tangkapan nelayan.
 2. Pengembangan Ekowisata Bahari: Kawasan mangrove yang tertata baik dapat dikembangkan menjadi destinasi ekowisata,

menciptakan lapangan kerja baru sebagai pemandu, pengelola, dan penjual produk lokal.

Keterkaitan dengan Misi 2: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

- **Strategi:** Pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim dan mitigasi bencana.
- **Program Terkait:**
 1. Pembangunan Sabuk Pantai Hijau (Green Belt): Penanaman mangrove dan vegetasi pantai secara masif sebagai benteng alami untuk melindungi infrastruktur vital seperti jalan pantura, pemukiman, dan lahan pertanian dari ancaman abrasi dan rob.
 2. Penerapan *Hybrid Engineering*: Mengkombinasikan bangunan keras (pemecah ombak, groin) dengan struktur alami (mangrove) untuk solusi perlindungan pantai yang lebih efektif dan ramah lingkungan.
 3. Program Pengendalian Pencemaran: Pengawasan ketat terhadap limbah industri dan pengelolaan sampah domestik di wilayah pesisir.

Keterkaitan dengan Misi 3: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial.

- **Strategi:** Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas lokal.
- **Program Terkait:**
 1. Sekolah Pesisir dan Sadar Lingkungan: Program edukasi bagi masyarakat dan pelajar mengenai pentingnya ekosistem pesisir.



2. Pelatihan dan Pendampingan Masyarakat: Memberikan pelatihan kepada kelompok masyarakat dalam teknik pembibitan mangrove, pengelolaan ekowisata, dan pengolahan hasil laut non-kayu.

Dampak yang diharapkan dari penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Kabupaten Batang bersifat struktural dan berkelanjutan:

- **Dampak Ekologis:**

- Pulihnya Keseimbangan Ekosistem: Terbentuknya kembali sabuk hijau mangrove yang berfungsi sebagai habitat, penyerap karbon, dan filter alami.
- Peningkatan Biodiversitas: Kembalinya berbagai jenis burung, ikan, kepiting, dan biota lain yang bergantung pada ekosistem mangrove.
- Peningkatan Resiliensi: Kawasan pesisir menjadi lebih tangguh dalam menghadapi ancaman kenaikan permukaan air laut dan cuaca ekstrem.

- **Dampak Ekonomi:**

- Ketahanan Pangan: Produktivitas perikanan tangkap dan budidaya tambak yang ramah lingkungan meningkat, menjamin ketersediaan sumber protein.
- Diversifikasi Ekonomi: Munculnya sumber-sumber pendapatan baru dari sektor pariwisata yang mengurangi ketergantungan tunggal pada perikanan.

- Penghematan Anggaran: Menurunnya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana pesisir.
- **Dampak Sosial:**
 - Meningkatnya Kohesi Sosial: Penguatan modal sosial melalui kerja sama dalam kelompok-kelompok masyarakat pelestari lingkungan.
 - Terlindunginya Ruang Hidup: Masyarakat pesisir merasa lebih aman dari ancaman abrasi dan rob yang mengancam pemukiman mereka.
 - Peningkatan Kapasitas dan Pengetahuan: Masyarakat memiliki pemahaman dan keterampilan untuk mengelola sumber daya alam di sekitarnya secara berkelanjutan.

3.2. Pemetaan Isu Permasalahan

Pemetaan isu permasalahan dilakukan dengan pendekatan diskusi terarah atau *Focus Group Discussion* (FGD). Setiap unsur dari OPD memberikan dan mengungkapkan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Batang di wilayah pesisir. Metode *Logical Framework Analysis* (LFA) digunakan untuk menggambarkan hubungan setiap isu permasalahan.

3.2.1 Kerusakan Ekosistem Laut dan Pesisir serta Pengelolaan Sumberdaya Alam

Kabupaten Batang menghadapi tantangan kritis dalam mengelola sumber daya pesisirnya. Secara fundamental, isu ini berakar pada ketidakjelasan regulasi dan tumpang tindih kewenangan antarlembaga di wilayah pesisir. Situasi ini menciptakan ambiguitas dalam penegakan hukum dan memfasilitasi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, baik dari



sektor industri maupun praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Dampak kerusakan ini termanifestasi secara nyata dan langsung mengancam ketahanan kota: abrasi pantai terus menggerus wilayah pesisir kritis, diperburuk oleh fenomena penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) akibat eksploitasi air tanah yang masif. Selain itu, sedimentasi parah di muara sungai memperburuk genangan rob dan banjir tahunan, sementara pencemaran limbah domestik dan industri merusak kualitas air dan habitat. Konsekuensi sosial-ekonomi akhirnya adalah penurunan hasil tangkapan nelayan yang mengancam mata pencaharian dan meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir Batang.

Oleh karena itu, penguatan tata kelola yang kolaboratif dan penegakan regulasi yang terpadu menjadi prasyarat mutlak untuk memulihkan fungsi ekosistem dan menjamin keberlanjutan kota. Pemetaan isu masalah sumberdaya pesisir dan lingkungan kawasan pesisir Kabupaten Batang dapat dilihat pada Gambar 6 dan skala prioritas pada Tabel 6.



Gambar 6. Peta isu sumber daya pesisir dan lingkungan Kabupaten Batang

Tabel 4. Skala prioritas isu sumber daya pesisir dan lingkungan Kabupaten Batang

No.	Isu Permasalahan	Penyebab (x2)	Akibat (x1)	Total	Skala Prioritas
1	Ahli Fungsi Lahan	12	1	13	I
2	Penebangan Liar	6	0	6	II
3	Kerusakan Kawasan Mangrove	4	3	7	II
4	Kenaikan Permukaan Air Laut	4	1	5	II
5	Polusi Sampah Plastik	6	3	9	II
6	Perburuan Lobster/Satwa	4	1	5	II
7	Degradasi Kehati	0	4	4	III
8	Sedimentasi	4	1	5	II
9	Overfishing	4	0	4	III
10	Penegakan Hukum	2	3	5	II
11	Kesadaran Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat	8	0	8	II
12	Penyempitan Area Tangkap Ikan	2	3	5	II
13	Rusaknya Muara Sungai	2	2	4	III
14	Limbah	6	0	6	II
15	Rusak Kawasan Konservasi	2	1	3	III
16	Pembangunan Industri	4	0	4	III

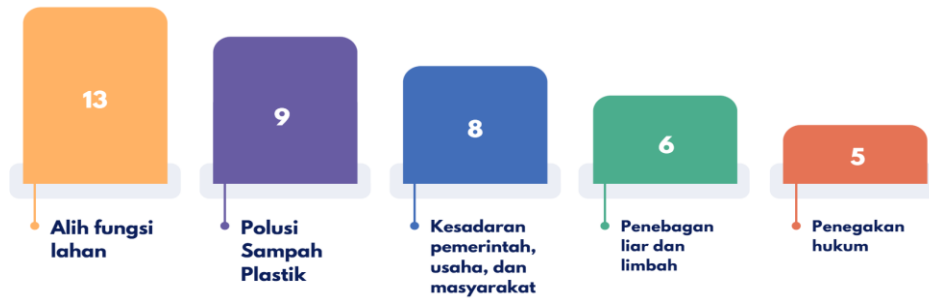
Isu paling krusial yang memerlukan penanganan segera adalah Alih Fungsi Lahan yang menjadi satu-satunya masalah dengan Skala Prioritas I. Skor penyebabnya yang sangat tinggi (12) menunjukkan bahwa faktor pendorong seperti tekanan pembangunan dan kebijakan tata ruang menjadi akar masalah yang paling fundamental. Temuan ini sejalan dengan



tren umum dalam analisis di mana sebagian besar isu memiliki skor penyebab yang lebih dominan daripada akibat. Hal ini diperkuat oleh masalah fundamental lainnya di Prioritas II, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah serta lemahnya penegakan hukum yang berfungsi sebagai pemicu bagi meluasnya permasalahan lingkungan lainnya.

Kelompok isu dalam Skala Prioritas II merepresentasikan serangkaian masalah kompleks yang saling terkait dan berimbas besar. Isu-isu seperti Polusi Sampah Plastik, Penebangan Liar, Kerusakan Kawasan Mangrove, dan Limbah menunjukkan adanya tekanan berat terhadap ekosistem. Masalah-masalah ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan manifestasi dari lemahnya kesadaran dan penegakan hukum yang telah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, penanganan isu-isu pada prioritas kedua ini menuntut pendekatan yang terintegrasi, bukan solusi parsial, karena satu masalah sering kali terkait erat dengan masalah lainnya.

Sementara itu, isu-isu dalam Skala Prioritas III, seperti degradasi, *overfishing*, dan rusaknya muara sungai, meskipun dinilai lebih rendah, memberikan catatan penting untuk kajian lebih lanjut. Adanya data anomali, seperti skor penyebab nol untuk degradasi dan skor akibat nol untuk *overfishing*, mengindikasikan bahwa dinamika permasalahan ini belum sepenuhnya terpetakan. Meskipun bukan prioritas utama, isu-isu ini berpotensi memburuk jika diabaikan dan menandakan perlunya pendalaman data untuk memahami hubungan sebab-akibatnya secara lebih akurat dalam perencanaan strategis ke depan.



Gambar 7. Isu prioritas sumber daya pesisir dan lingkungan Kabupaten Batang

a. Ahli fungsi lahan dan ketegasan regulasi

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian di Kabupaten Batang adalah alih fungsi lahan yang kerap terjadi, terutama di kawasan pesisir yang secara biologis memiliki daya dukung yang penting bagi ekosistem lokal. Proses ini berpotensi menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan hilangnya ekosistem mangrove yang berfungsi sebagai penahan abrasi dan habitat bagi berbagai spesies.

Untuk menanggulangi permasalahan alih fungsi lahan, Kabupaten Batang telah melakukan pembuatan regulasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) demi menjamin pengelolaan yang berkelanjutan. Kebijakan ini bersifat strategis dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan. Dalam hal ini, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di kawasan pesisir menjadi prioritas, dengan melibatkan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Satpol PP.

Sosialisasi yang intensif mengenai peraturan perundang-undangan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Monitoring pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Kegiatan pemantauan

yang dilakukan secara rutin akan memfasilitasi pengumpulan data serta evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan RTRW.

b. Kerusakan kawasan mangrove dan vegetasi pantai

Kerusakan kawasan mangrove dan vegetasi pantai merupakan isu krusial lain yang dihadapi oleh Kabupaten Batang. Keberadaan mangrove sangat vital bagi ekosistem pesisir, tidak hanya sebagai tempat berlindung bagi berbagai spesies, tetapi juga sebagai penyerap karbon yang membantu mitigasi perubahan iklim. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah daerah perlu menetapkan regulasi yang melindungi kawasan mangrove serta vegetasi pantai. Penyusunan regulasi di tingkat daerah dan desa tentang perlindungan kawasan mangrove diharapkan dapat memperkuat langkah-langkah konservasi yang telah diambil.

Rehabilitasi kawasan mangrove merupakan langkah yang mendesak untuk dilakukan. Dalam hal ini, penetapan kawasan vegetasi pantai dan pembangunan infrastruktur pelindung pantai sesuai dengan kondisi wilayah akan sangat membantu dalam memitigasi dampak negatif dari perubahan iklim. Penegakan regulasi yang ada juga perlu diawasi dengan seksama agar penyalahgunaan penggunaan lahan di kawasan mangrove dapat ditekan seminimal mungkin. Monitoring kondisi terkini dari kawasan mangrove, melalui pemantauan berbasis teknologi seperti sistem informasi geografis (GIS), dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai perubahan yang terjadi.

c. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ekosistem kawasan mangrove dan vegetasi pantai

Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kawasan mangrove dan vegetasi pantai sangat diperlukan. Program peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir mengejar partisipasi



aktif masyarakat lokal dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam. Selain itu, peran serta pemerintah dan pemilik usaha perlu digalakkan untuk menciptakan sinergi yang saling menguatkan. Sosialisasi tentang tanggung jawab sosial dan keberadaan program pemerintah tentang kesiapsiagaan bencana harus dilaksanakan guna mengoptimalkan upaya mitigasi di wilayah pesisir.

d. Pengembangan ekowisata kawasan mangrove dan vegetasi pantai

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, pemanfaatan mangrove dan vegetasi pantai untuk ekowisata perlu dikembangkan sebagai alternatif pendapatan masyarakat sekitarnya. Pengembangan ekowisata yang berbasis mangrove dapat menghadirkan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian lokal. Langkah ini harus diiringi dengan promosi yang tepat untuk menarik minat wisatawan dan masyarakat dalam melestarikan keindahan alam pesisir Batang.

e. Konflik limbah dan sampah plastik

Sementara itu, permasalahan limbah, baik itu limbah padat maupun cair, menjadi isu kritis yang menuntut perhatian lebih. Penanganan limbah yang tidak efektif sering kali berimbas pada kualitas lingkungan yang menurun. Oleh karena itu, sosialisasi dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) mengenai persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu diperkuat. Pembentukan kelompok masyarakat yang muda dan peka terhadap isu sampah diharapkan dapat mendukung program "sampah habis di desa." Pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan ekonomi di kawasan pesisir juga menjadi bagian integral dari solusi yang ditawarkan.



Selain itu, penambahan infrastruktur pengelolaan sampah sangat penting untuk memfasilitasi pengelolaan limbah yang lebih efektif. Pembangunan tempat pembuangan sampah 3R atau tempat pengelolaan sampah terpadu di wilayah pesisir akan menambah kapasitas pengelolaan sampah serta bisa memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan sampah yang lebih modern. Pengawasan terhadap aktivitas usaha serta perumusan regulasi di tingkat lokal seperti Peraturan Desa (Perdes) yang melarang pembuangan limbah ke sungai sangat penting untuk menyakinkan komunitas bahwa tindakan ini berdampak jangka panjang terhadap lingkungan.

Pentingnya pengelolaan sistem persampahan dari hulu menuju hilir juga perlu ditekankan dalam kebijakan yang dicanangkan. Sasaran dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar menjadi bagian dari skema untuk mendorong kepatuhan masyarakat dan sektor usaha dalam pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

f. Darurat air bersih

Adanya permasalahan darurat air bersih, sedimentasi, dan kerusakan muara sungai di Kabupaten Batang juga memerlukan perhatian serius. Sebagai daerah dengan pertumbuhan penduduk yang signifikan, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi tantangan tersendiri. Penetapan kawasan daerah tangkapan air dan sumber mata air perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Pengurangan pemanfaatan air tanah dan pengembangan teknologi desalinasi untuk pemanfaatan air laut juga bisa menjadi bagian dari solusi yang ada.

Pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dari berbagai aktivitas usaha serta penetapan klasifikasi sungai di Kabupaten Batang menjadi langkah strategis untuk menjaga kualitas sumber daya air. Perlu adanya kerjasama yang lebih terintegrasi antara pemerintah daerah dengan pusat, serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya air. Restorasi lamun laut di kawasan pesisir dan pengaturan zonasi kawasan karang juga menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya konservasi yang semestinya dilakukan untuk memulihkan dan menjaga keseimbangan ekosistem pesisir yang semakin terdegradasi.

Mengingat kompleksitas tantangan yang ada, kolaborasi antar instansi terkait menjadi sangat penting dalam merumuskan kebijakan dan program yang komprehensif. Sinergi antar pemangku kepentingan perlu terus dibangun untuk memastikan bahwa semua elemen masyarakat berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan. Komitmen jangka panjang diperlukan untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih baik tidak hanya untuk Kabupaten Batang, tetapi juga untuk masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam yang ada

3.2.2 Infrastruktur dan Sanitasi

Kabupaten Batang menghadapi tantangan infrastruktur dan sanitasi yang bersifat sistemik dan saling terkait, di mana satu masalah menjadi penyebab sekaligus akibat dari masalah lainnya. Titik pusat dari persoalan ini adalah terbentuknya pemukiman kumuh yang dipicu oleh berbagai faktor. Akar masalah sanitasi berawal dari kesadaran masyarakat terkait sampah yang masih rendah. Perilaku ini menyebabkan pengelolaan sampah menjadi belum memadai, yang secara langsung menciptakan lingkungan kumuh. Hal



ini diperparah oleh kondisi sanitasi air limbah domestik yang minim atau buruk, di mana limbah tidak dikelola dengan baik dan mencemari lingkungan sekitar. Kedua masalah ini—sampah dan limbah—berkontribusi langsung pada drainase yang buruk, karena saluran air tersumbat dan tidak berfungsi optimal.

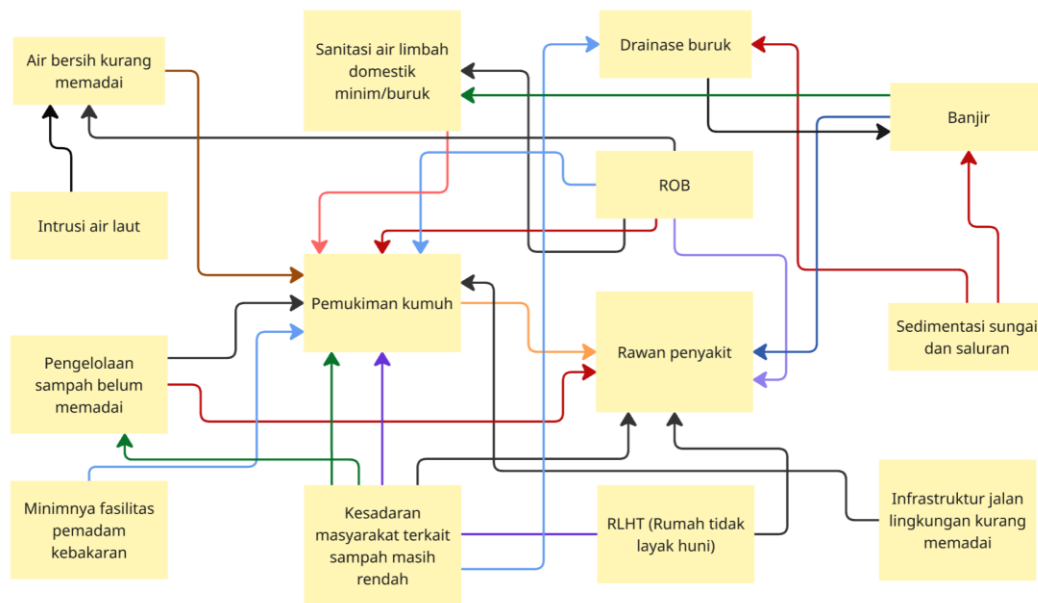
Defisit infrastruktur dasar kemudian memperburuk kondisi ini. Banyak warga yang tinggal di RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang menjadi ciri khas pemukiman kumuh. Kualitas hidup semakin menurun dengan adanya infrastruktur jalan lingkungan yang kurang memadai dan pasokan air bersih yang juga kurang memadai—salah satunya akibat adanya intrusi air laut di wilayah pesisir. Kepadatan di pemukiman kumuh ini juga tidak diimbangi dengan infrastruktur keselamatan yang cukup seperti minimnya fasilitas pemadam kebakaran, sehingga meningkatkan risiko bencana saat terjadi kebakaran.

Dampak dari akumulasi masalah ini meluas menjadi bencana lingkungan. Drainase yang buruk ditambah dengan sedimentasi sungai dan saluran akibat penumpukan sampah menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Selain itu, sebagai wilayah pesisir, kawasan ini juga rentan terhadap *rob* (banjir pasang air laut), yang semakin memperburuk kondisi sanitasi dan infrastruktur yang ada. Seluruh persoalan ini bermuara pada ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat. Kombinasi dari lingkungan pemukiman kumuh, sanitasi yang buruk, banjir, rob, dan hunian yang tidak layak secara kolektif menjadikan kawasan tersebut sebagai zona rawan penyakit, di mana masyarakat sangat rentan terjangkit berbagai penyakit berbasis lingkungan (Gambar 8).

Pemetaan isu infrastruktur dan sanitasi di kawasan pesisir Kabupaten Batang sangat penting karena wilayah ini menghadapi tantangan kompleks tersebut. Pemetaan isu masalah infrastruktur dan sanitasi kawasan pesisir



Kabupaten Batang (Gambar 8) dan skala prioritas (Tabel 7). Perencanaan tata ruang yang baik menjadi kunci utama dalam mengelola pertumbuhan kawasan pesisir. Dengan perencanaan yang tepat, pemerintah dapat mengatur zonasi permukiman, kawasan industri, dan area konservasi sehingga dapat mencegah berkembangnya permukiman kumuh dan ilegal. Selain itu, tata ruang yang terencana juga mampu mengakomodasi kebutuhan penduduk baru tanpa mengorbankan kualitas lingkungan.



Gambar 8. Peta isu infrastruktur dan sanitasi Kabupaten Batang

Tabel 5. Skala prioritas isu infrastruktur dan sanitasi Kabupaten Batang

No	Isu Permasalahan	Penyebab (x2)	Akibat (x1)	Total	Skala Prioritas
1	Air Bersih	2	2	4	III
2	Lapak Penjualan TPI	2	0	2	III
3	Pengelolaan Sampah	4	1	5	II
4	Pemadam Kebakaran	2	0	2	III
5	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	4	0	4	III
6	Sanitasi Air Limbah Domestik	2	2	4	III

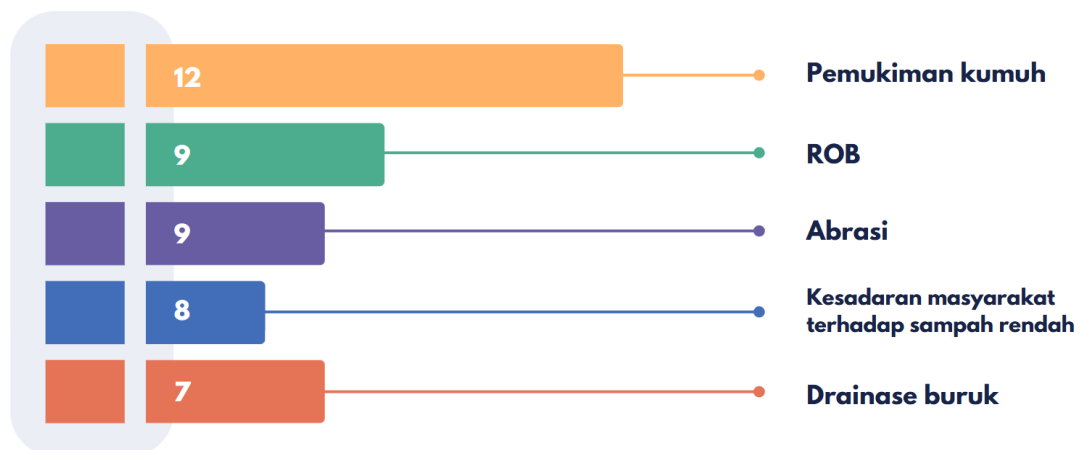
No	Isu Permasalahan	Penyebab (x2)	Akibat (x1)	Total	Skala Prioritas
7	Infrastruktur Jl. Lingkungan	2	1	3	III
8	Permukiman Kumuh	2	10	12	I
9	Kesadaran Masyarakat Rendah terhadap sampah	8	0	8	II
10	Drainase Buruk	4	3	7	II
11	Rawan Penyakit	0	6	6	II
12	Rob	8	1	9	I
13	Banjir	6	3	9	I
14	Sedimentasi Sungai	4	0	4	III
15	Intrusi Air Laut	2	0	2	III

Isu-isu yang teridentifikasi dikelompokkan ke dalam tiga skala prioritas yang menyoroti urgensi penanganan. Pada Skala Prioritas I, terdapat tiga isu paling mendesak yang harus segera ditangani, yaitu Permukiman Kumuh, Rob, dan Banjir. Isu permukiman kumuh menempati urutan teratas dengan skor total 12, yang secara signifikan didorong oleh skor akibat (10), mengindikasikan bahwa dampak negatif dari permukiman kumuh dirasakan sangat berat. Sementara itu, Rob (skor total 9) dan Banjir (skor total 9) juga menjadi prioritas utama, dengan skor penyebab yang tinggi (masing-masing 8 dan 6), menunjukkan bahwa faktor-faktor pemicu terjadinya genangan dan luapan air ini merupakan akar masalah yang sangat signifikan dan perlu intervensi segera.

Skala Prioritas II mencakup serangkaian isu yang saling terkait erat, terutama dalam lingkup sanitasi dan kesadaran lingkungan. Isu Kesadaran Masyarakat Rendah terhadap sampah menjadi yang paling menonjol di kategori ini dengan skor total 8 di mana skor penyebabnya sangat dominan

(8). Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran merupakan faktor fundamental yang memicu masalah lain seperti Pengelolaan Sampah yang tidak optimal (skor total 5) dan Drainase Buruk (skor total 7) akibat saluran air yang tersumbat. Rangkaian masalah ini pada akhirnya berkontribusi pada munculnya isu Rawan Penyakit, yang memiliki skor akibat sangat tinggi (6), menandakan bahwa dampak kesehatan dari buruknya sanitasi lingkungan sudah sangat dirasakan.

Isu-isu dalam Skala Prioritas III merupakan masalah-masalah mendasar yang meskipun memiliki skor total lebih rendah tetap memerlukan perhatian karena menyangkut kualitas hidup dasar warga. Kategori ini mencakup kebutuhan akan Air Bersih (skor total 4), Sanitasi Air Limbah Domestik (skor total 4), RTLH (skor total 4), serta infrastruktur dasar seperti Infrastruktur Jl. Lingkungan (skor total 3). Menariknya, beberapa isu seperti Intrusi Air Laut (skor total 2) dan Sedimentasi Sungai (skor total 4) memiliki skor akibat nol, yang bisa berarti dampaknya belum terukur secara signifikan atau telah terakumulasi ke dalam masalah yang lebih besar seperti banjir dan ketersediaan air bersih. Penanganan isu-isu prioritas III ini bersifat preventif dan fundamental untuk mendukung penyelesaian masalah di tingkat prioritas yang lebih tinggi.



Gambar 9. Isu prioritas infrastruktur dan sanitasi Kabupaten Batang

a. Penyediaan air bersih dan sanitasi yang memadai

Kabupaten Batang, yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah, menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan permukiman kumuh. Salah satu isu penting adalah penyediaan air bersih dan sanitasi yang memadai bagi penduduk. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah bertekad untuk meningkatkan akses dan kualitas sistem penyediaan air minum. Program pengelolaan persampahan juga menjadi fokus utama, di mana pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan implementasi dirasa penting untuk memastikan keberhasilan. Oleh karena itu, keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) serta masyarakat harus ditingkatkan untuk membangun infrastruktur yang mendukung akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.

Efektivitas program sanitasi sangat tergantung pada pengelolaan yang terintegrasi, mencakup pengelolaan limbah padat dan limbah cair. Program penyediaan sarana sanitasi yang sesuai standar telah dicanangkan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Sasaran ini tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur tetapi juga kemampuan masyarakat dalam mengelola sistem sanitasi dengan baik. Pengetahuan tentang sanitasi yang aman dan pengelolaan limbah harus disebarluaskan kepada masyarakat guna mencapai tujuan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

b. Penataan pemukiman

Meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Batang juga penting dalam penataan pemukiman. Program yang berfokus pada peningkatan sarana dan fasilitas umum, serta perbaikan drainase, akan berkontribusi besar terhadap pengurangan risiko banjir serta memperbaiki keseluruhan lingkungan permukiman. Penataan pemukiman yang baik tidak hanya akan memberi manfaat kepada masyarakat dalam konteks kenyamanan, namun

juga akan berimplikasi pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Program perumahan bagi kawasan pemukiman kumuh harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, untuk memastikan keberlanjutan serta relevansi solusi yang diterapkan.

Regulasi yang jelas dalam penataan bangunan juga sangat penting. Penegakan peraturan yang ditetapkan oleh DPU PR dan Satpol PP menjadi landasan untuk memastikan setiap bangunan yang ada di Kabupaten Batang mematuhi ketentuan yang berlaku. Sosialisasi mengenai peraturan dan proses perizinan bangunan juga harus dilakukan untuk memfasilitasi kepatuhan dari masyarakat dan pemilik bangunan. Di sisi lain, kemudahan dalam proses perizinan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk secara sukarela mendaftar izin bangunan, sehingga pengendalian penggunaan lahan dapat dijalankan dengan lebih baik.

c. Penataan sistem drainase

Penataan sistem drainase merupakan instrumen penting dalam manajemen risiko banjir di Kabupaten Batang. Langkah-langkah strategis seperti perbaikan dimensi saluran dan normalisasi sungai diperlukan untuk memperkuat kapasitas adaptasi daerah terhadap ancaman hidrometeorologi. Pembangunan bangunan pengendali banjir pun harus mengedepankan pendekatan berbasis kebutuhan lokal serta prinsip kolaborasi antarpihak dalam fase perencanaan hingga implementasi. Guna menjaga efektivitas infrastruktur tersebut, program pembersihan sungai perlu diintegrasikan sebagai upaya preventif dalam pemeliharaan saluran air.

Konservasi lahan, terutama di daerah hulu, merupakan langkah penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi lahan dari hulu dapat meningkatkan



kesadaran dan rasa memiliki terhadap lingkungan. Program-program yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pengolahan sampah dari hulu juga harus diterapkan agar masyarakat terlibat aktif dalam menjaga kualitas lingkungan.

Pembangunan infrastruktur yang memadai, termasuk tanggul laut dan pembaruan bangunan pemecah gelombang, juga menjadi perhatian dalam mitigasi ancaman abrasi yang semakin mengkhawatirkan. Pembangunan ini harus dilaksanakan secara berencana dan melibatkan stakeholders dari berbagai latar belakang, termasuk pihak pemerintah pusat dan swasta. Dengan memperhatikan karakteristik dan potensi masing-masing daerah, pembangunan tanggul laut dapat lebih efektif dalam menanggulangi masalah abrasi di pesisir.

3.2.3 Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir

a. Penurunan hasil produksi pertanian dan perikanan

Kabupaten Batang, menghadapi berbagai isu ekonomi yang berkaitan dengan sektor pertanian dan perikanan, yang merupakan tulang punggung mata pencaharian masyarakat setempat. Penurunan hasil pertanian dan perikanan di kawasan ini menjadi salah satu tantangan yang harus segera ditangani. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan hasil tersebut antara lain adalah perubahan iklim, degradasi lahan, serta kurangnya akses terhadap teknologi modern.

Intensifikasi pertanian merupakan salah satu solusi yang diusulkan untuk mengatasi penurunan hasil pertanian. Melalui pendekatan ini, diharapkan para petani dapat memaksimalkan penggunaan lahan dan meningkatkan produktivitas pertanian dengan menerapkan teknik pertanian modern yang lebih efisien. Selain itu, peningkatan kapasitas

sumber daya manusia juga menjadi krusial, di mana pelatihan bagi petani mengenai cara-cara bertani yang lebih baik dan ramah lingkungan akan membantu mereka dalam meningkatkan hasil panen. Rehabilitasi lahan yang terdegradasi dan revitalisasi sektor perikanan juga sangat dibutuhkan, mengingat lahan yang subur dan ekosistem perairan yang sehat menjadi penopang utama bagi petani dan nelayan.

Program yang dicanangkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang perlu mencakup penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang lebih baik. Penyuluhan mengenai praktik pertanian yang baik juga harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua petani memiliki akses terhadap pengetahuan terbaru. Selain itu, pengelolaan budidaya dalam sektor perikanan, termasuk teknik pengolahan yang lebih baik, harus dilakukan agar hasil tangkapan dapat meningkat dan berdaya saing tinggi di pasaran. Pemasaran hasil pertanian dan perikanan juga perlu mendapatkan perhatian agar produk-produk lokal dapat dipasarkan dengan baik dan memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi petani dan nelayan.

b. Rendahnya teknologi pengelolaan hasil perikanan dan pertanian

Isu rendahnya teknologi dalam pengelolaan hasil perikanan dan pertanian juga harus dihadapi. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan terhadap petani dan nelayan menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi modern. Penyediaan sarana pertanian yang memadai dan bantuan infrastruktur seperti alat-alat pertanian yang canggih dan ramah lingkungan juga sangat diharapkan untuk mendukung peningkatan produk. Selain itu, dukungan terhadap kegiatan inovatif dalam pengolahan hasil pertanian dan perikanan akan memberikan dampak positif



dalam meningkatkan daya saing produk lokal di tingkat nasional maupun internasional.

c. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus dalam upaya mengatasi penurunan kesejahteraan. Bantuan sosial serta hibah dari pemerintah dalam bentuk penyediaan sarana pertanian yang lebih baik dan program penyuluhan akan sangat membantu masyarakat dalam pemulihan ekonominya. Instansi terkait, seperti kementerian sosial dan lembaga perbankan, perlu bermitra dengan pemerintah provinsi untuk memastikan bahwa bantuan dapat disalurkan secara efektif dan tepat sasaran. Ini penting agar masyarakat dapat kembali meningkatkan kesejahteraan mereka dan melanjutkan usaha pertanian dan perikanan yang merupakan mata pencaharian utama.

d. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif

Selain sektor pertanian dan perikanan, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Batang juga memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan daya tarik daerah. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan daya tarik destinasi wisata serta pengelolaan kawasan strategis pariwisata yang dapat menarik wisatawan untuk datang. Dalam konteks ini, peningkatan ekonomi kreatif juga penting melalui pemanfaatan kekayaan intelektual masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia di sektor pariwisata. Dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengembangan koperasi sangatlah penting untuk mendukung permodalan usaha, sehingga menciptakan ekosistem yang saling mendukung untuk pertumbuhan ekonomi daerah.



Diskusi mengenai ekonomi hijau dan biru di wilayah pesisir juga patut mendapat perhatian. Potensi kawasan pesisir sebagai kawasan ekonomi khusus perlu dimaksimalkan dengan memperhatikan aspek lingkungan yang berkelanjutan. Penerapan ekonomi biru harus diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sambil menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, konservasi ekosistem laut, serta penerapan praktik-praktik ramah lingkungan dalam setiap aktivitas ekonomi yang berlangsung di kawasan pesisir.

e. Diversifikasi usaha

Diversifikasi usaha dalam bidang perikanan dan pertanian juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam hal ini, pengembangan budidaya ikan hias dapat dijadikan peluang baru yang menjanjikan. Kampung ikan hias dapat diaktifkan sebagai daya tarik wisata, di mana pengunjung dapat belajar tentang cara budidaya ikan serta menikmati keindahan variasi ikan hias yang ada. Inisiatif tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif bagi peningkatan ekonomi lokal serta memberikan peluang bagi masyarakat untuk beradaptasi dalam menghadapi tantangan yang ada.

3.2.4 Pengembangan Sosial Masyarakat Pesisir

Masalah sosial dan ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Batang adalah menurunnya kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini secara langsung disebabkan oleh dua faktor utama: hilangnya mata pencaharian nelayan dan kondisi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau miskin. Kedua faktor ini saling memperkuat, di mana hilangnya pekerjaan utama di sektor perikanan secara otomatis menyebabkan pendapatan menurun. Selain itu,



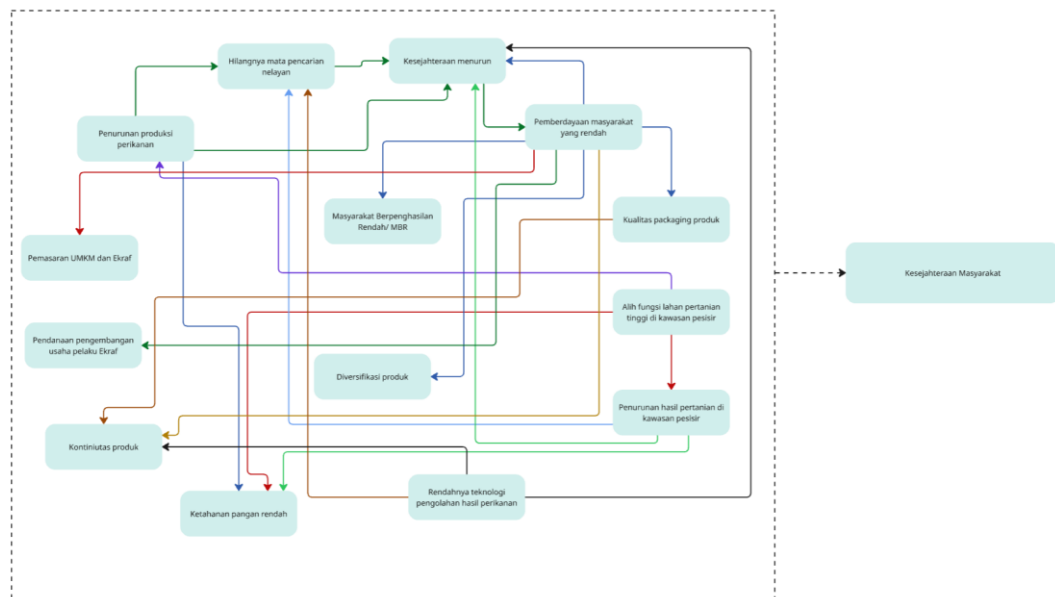
faktor pemberdayaan masyarakat yang rendah juga menjadi pendorong utama yang membuat masyarakat kesulitan untuk keluar dari siklus kemiskinan, karena kurangnya kapasitas dan keterampilan untuk beradaptasi atau menciptakan peluang baru.

Akar masalah dari menurunnya kesejahteraan ini bersifat multidimensional dan saling terkait. Salah satu pemicu utamanya adalah penurunan produksi perikanan, yang menjadi penyebab langsung hilangnya mata pencaharian. Di sisi lain, dari sektor ekonomi, kendala seperti rendahnya teknologi pengolahan hasil perikanan, kesulitan pemasaran UMKM, dan kurangnya diversifikasi produk menciptakan lingkaran setan. Tanpa teknologi dan pemasaran yang baik, produk yang dihasilkan memiliki nilai jual rendah, sehingga pendapatan tetap kecil dan tidak ada modal untuk melakukan inovasi. Masalah ini diperparah oleh tekanan dari sektor darat, yaitu tingginya alih fungsi lahan pertanian yang menyebabkan penurunan hasil pertanian, sehingga pilihan mata pencaharian di luar sektor perikanan juga semakin terbatas. Sejalan dengan pemetaan isu infrastruktur di atas, kondisi kemiskinan meski bukan satu-satunya tetapi dapat menjadi salah satu faktor penyumbang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terutama pada perempuan, disabilitas dan lansia, serta salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan anak.

Diagram ini juga menguraikan jalan keluar menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Solusi strategis yang ditawarkan berpusat pada penguatan kapasitas ekonomi lokal. Upaya seperti pendanaan untuk pengembangan usaha menjadi kunci untuk memutus siklus kemiskinan, karena dapat mendorong adopsi teknologi, inovasi, dan diversifikasi produk. Ketika produk lebih beragam dan berkualitas (didukung kualitas packaging yang baik), maka akan tercipta kontinuitas produk dan akses pasar yang lebih luas. Rangkaian solusi ini pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan

sumber-sumber pendapatan baru, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan memberdayakan masyarakat agar tidak hanya bergantung pada sektor perikanan tangkap yang semakin menurun.

Pemetaan isu sosial dan ekonomi kawasan pesisir Kabupaten Batang dapat dilihat pada Gambar 10, sedangkan skala prioritas isu dapat dilihat pada Tabel 6.



Gambar 10. Peta isu sosial ekonomi Kabupaten Batang

Tabel 6. Skala prioritas isu sosial dan ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Batang

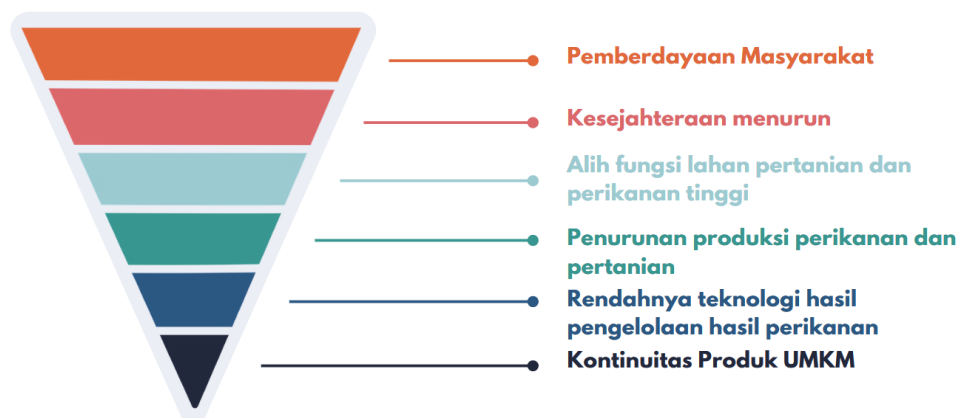
No	Isu Permasalahan	Penyebab (x2)	Akibat (x1)	Total	Skala Prioritas
1	Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Perikanan Tinggi	6	0	6	III
2	Penurunan Hasil Pertanian di Kawasan Pesisir	6	1	7	II
3	Penurunan Produksi Perikanan dan Pertanian	6	1	7	II
4	Hilangnya Mata Pencarian	2	1	3	III

No	Isu Permasalahan	Penyebab (x2)	Akibat (x1)	Total	Skala Prioritas
5	Rendahnya Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	6	0	6	III
6	Kesejahteraan Menurun	2	5	7	II
7	Pemberdayaan Masyarakat	16	1	17	I
8	Diversifikasi Produk	2	2	4	III
9	Pemasaran Produk Umum dan Ekraf	2	2	4	III
10	Pendanaan Pengembangan Usaha Pelaku Ekraf dan UMKM	2	1	3	III
11	Kualitas Produk dan Packaging	4	1	5	III
12	Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	2	1	3	III
13	Kontinuitas Produk UMKM	2	4	6	III

Isu dengan peringkat tertinggi dan menjadi fokus utama adalah pemberdayaan masyarakat dengan nilai total 17. Hal ini mengindikasikan bahwa rendahnya pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai akar penyebab dari berbagai permasalahan lainnya. Di sisi lain, isu ini menempatkan pemberdayaan bukan sekadar sebagai salah satu program, melainkan sebagai fondasi strategis yang penanganannya diharapkan dapat memberikan dampak domino untuk menyelesaikan isu-isu turunan lainnya secara lebih efektif.

Pada Peringkat II, terdapat tiga isu krusial yang saling berkaitan erat, yaitu Penurunan Hasil Pertanian di Kawasan Pesisir, Penurunan Produksi Perikanan dan Pertanian, dan Kesejahteraan Menurun, yang ketiganya memiliki nilai total 7. Penurunan produksi pertanian dan perikanan memiliki skor penyebab yang tinggi (6), menunjukkan bahwa keduanya merupakan pemicu signifikan terhadap masalah ekonomi di kawasan tersebut. Di sisi lain, menurunnya kesejahteraan memiliki skor akibat yang lebih dominan (5), menandakan bahwa kondisi ini adalah dampak akhir yang paling dirasakan oleh masyarakat akibat dari berbagai masalah produksi dan ekonomi yang terjadi.

Isu-isu yang masuk dalam Peringkat III, meskipun nilainya lebih rendah, merupakan faktor-faktor pendukung yang penting dan tidak dapat diabaikan. Masalah seperti Rendahnya Teknologi Hasil Pengolahan (nilai 6), Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Perikanan Tinggi (nilai 6), dan Kontinuitas Produk UMKM (nilai 6) memiliki skor penyebab yang cukup signifikan, menunjukkan perannya sebagai penghambat operasional dalam rantai ekonomi masyarakat. Sementara itu, isu lain seperti kurangnya pendanaan usaha (nilai 3), kualitas produk dan packaging yang rendah (nilai 5), serta hilangnya masa pencaharian (nilai 3) melengkapi gambaran tantangan yang dihadapi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.



Gambar 11. Isu prioritas sosial dan ekonomi Kabupaten Batang

a. Pemberdayaan perempuan

Salah satu pilar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pemberdayaan perempuan. Pelatihan tentang pemberdayaan perempuan serta sosialisasi kesetaraan gender perlu dilakukan secara masif untuk meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan. Dengan meningkatkan kapasitas perempuan dalam hal keterampilan dan pengetahuan, diharapkan mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dalam perekonomian lokal. Pemberdayaan perempuan tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi individu, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

b. Penanggulangan bencana dalam konteks sosial

Pemerintah Kabupaten Batang perlu memprioritaskan penanggulangan bencana melalui pendekatan sosial yang komprehensif. Langkah strategis ini mencakup penguatan edukasi publik, penyelenggaraan pelatihan tanggap darurat secara rutin, serta penjaminan distribusi logistik yang sigap bagi para korban. Dengan membekali masyarakat melalui pemahaman mitigasi dan respons yang tepat, ketangguhan daerah dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana dapat ditingkatkan secara signifikan.

Penanggulangan kemiskinan juga menjadi fokus tersendiri dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan dan pelayanan sosial yang tepat sasaran sangat diperlukan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Pelatihan dan motivasi pemilihan sosial dan ekonomi bagi korban bencana akan membantu mereka memahami cara untuk mengatasi kerentanan terhadap kemiskinan. Penyaluran bantuan berupa modal, pembelian alat bantu bagi penyandang disabilitas, serta pemberian

santunan bagi anak yatim piatu adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk menjangkau kelompok-kelompok yang paling rentan.

c. Peningkatan akses dan kualitas layanan publik

Pemerintah Kabupaten Batang memainkan peran penting dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan publik. Pelayanan dokumentasi kependudukan di seluruh desa sangat penting untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses bantuan yang memerlukan identitas. Pengelolaan jaminan kesehatan oleh Dinas Kesehatan harus dioptimalkan, memastikan bahwa setiap warga mendapatkan akses yang layak terhadap layanan kesehatan. Melalui optimalisasi pusat kesejahteraan sosial pada level desa atau kelurahan, masyarakat dapat memperoleh integrasi layanan yang mudah diakses dan dapat diandalkan.

d. Peluang beasiswa Pendidikan

Upaya penanganan isu pendidikan dan mitigasi perkawinan anak merupakan agenda strategis yang memerlukan pendekatan terpadu. Dukungan bantuan finansial berupa beasiswa dan penyediaan seragam gratis ditujukan untuk menjamin kesetaraan hak pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan Pendidikan Kecakapan Masyarakat menjadi krusial dalam meningkatkan literasi dan kompetensi publik. Lebih lanjut, edukasi pencegahan perkawinan dini melalui program berbasis keluarga perlu diperluas guna melindungi masa depan anak dari hambatan perkembangan psikologis dan akademik.



e. Intervensi kesehatan

Intervensi kesehatan, terutama dalam menangani penyakit menular dan stunting, memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Rehabilitasi rumah tidak layak huni akan berkontribusi pada pengurangan risiko terjadinya penyakit menular. Selain itu, pemeriksaan dan pengobatan untuk penyakit seperti TB dan HIV/AIDS perlu diperluas agar dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Pendampingan bagi keluarga berisiko stunting melalui pemberian makanan tambahan dan bimbingan mengenai pola makan sehat sangat penting bagi pertumbuhan anak-anak di Kabupaten Batang.

f. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga harus menjadi agenda terdepan. Sosialisasi tentang pencegahan kekerasan, disertai pendampingan dan mediasi bagi korban, merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman. Peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi pun perlu diadakan untuk mendukung kesehatan komunitas dan mengurangi kemungkinan terjadinya masalah sosial yang lebih besar. Dengan memberdayakan perempuan melalui pelatihan dan sosialisasi kesetaraan gender, diharapkan posisi perempuan dalam masyarakat semakin kuat.

g. Sosialisasi penanggulangan bencana dan banjir rob

Banjir rob Kabupaten Batang menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Sosialisasi penanggulangan bencana merupakan pilar utama dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk meminimalisir risiko timbulnya korban jiwa dan kerugian materi. Melalui edukasi yang berkelanjutan, masyarakat diberikan pemahaman mendalam mengenai

pemetaan wilayah rawan, prosedur evakuasi yang mandiri, serta pentingnya menjaga ekosistem lingkungan sebagai benteng pertahanan alami. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat dari yang sebelumnya bersifat reaktif saat bencana terjadi, menjadi lebih proaktif dalam melakukan langkah-langkah mitigasi jauh sebelum ancaman muncul.

Sosialisasi harus difokuskan pada adaptasi pola hidup masyarakat pesisir terhadap kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah pada penanganan banjir rob. Edukasi ini mencakup pemahaman jadwal pasang surut air laut, pemeliharaan sistem drainase lokal secara gotong royong, hingga penerapan teknik konstruksi bangunan yang adaptif terhadap genangan air. Dengan pemahaman yang tepat mengenai karakteristik banjir rob yang bersifat repetitif (berulang), masyarakat diharapkan mampu mengelola risiko secara mandiri serta mendukung program jangka panjang pemerintah dalam pembangunan infrastruktur pelindung pantai dan rehabilitasi ekosistem mangrove.

3.3. Penilaian berdasarkan *State of the Coast*

Merujuk pada dokumen *State of the Coast* Kabupaten Batang tahun 2023, Kabupaten Batang telah menunjukkan kepemilikan kapasitas parsial dalam mengelola wilayah pesisirnya, dengan beberapa indikator kunci yang telah mencapai status "Baik". Kekuatan utama daerah ini terletak pada aspek ekonomi dan penghidupan masyarakat pesisir yang relatif stabil. Selain itu, Kabupaten Batang juga menunjukkan performa positif dalam hal kepatuhan (*compliance*) terhadap regulasi yang terkait dengan pengendalian pencemaran.

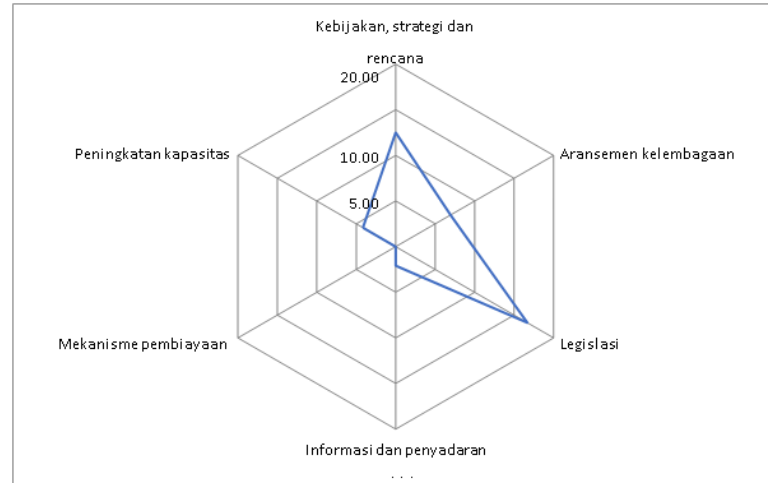
Modalitas penting lainnya adalah ketersediaan data habitat serta adanya program perlindungan yang relatif baik, yang mana kedua hal ini



menjadi aset strategis yang akan sangat memudahkan berbagai pemangku kepentingan jika hendak merancang dan mengimplementasikan upaya rehabilitasi maupun perlindungan ekosistem di masa depan.

Meskipun demikian, di luar capaian positif tersebut, kesenjangan (*gap*) yang relatif banyak masih ditemukan pada berbagai indikator instrumental lainnya. Tantangan signifikan teridentifikasi pada aspek tata kelola, khususnya pada indikator aransemen kelembagaan dan lemahnya partisipasi publik. Kesenjangan ini diperparah oleh kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang teridentifikasi belum memadai dalam pemahaman isu-isu krusial seperti Pengelolaan Pesisir Terpadu (ICM), mitigasi kebencanaan, dan strategi adaptasi perubahan iklim. Lebih lanjut, terindikasi bahwa sistem pengelolaan pencemaran secara keseluruhan juga masih memiliki celah untuk memenuhi standar idealnya.

Area yang memerlukan intervensi paling mendesak adalah pada kelompok indikator yang masih menunjukkan status "Buruk". Hal ini mencakup aspek fundamental seperti rendahnya penyadaran publik (*public awareness*) dan minimnya pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*) secara sistematis. Lebih jauh, program peningkatan kapasitas SDM dan ketersediaan skema pembiayaan yang berkelanjutan untuk mendukungnya juga dinilai masih "Buruk". Kelemahan struktural ini dilengkapi oleh aspek teknis yang esensial, yaitu pada indikator pemantauan kualitas air, yang juga menunjukkan status "Buruk" dan memerlukan perbaikan segera.



Gambar 12. Diagram Radar Posisi Antar Elemen Tata Kelola Kabupaten Batang

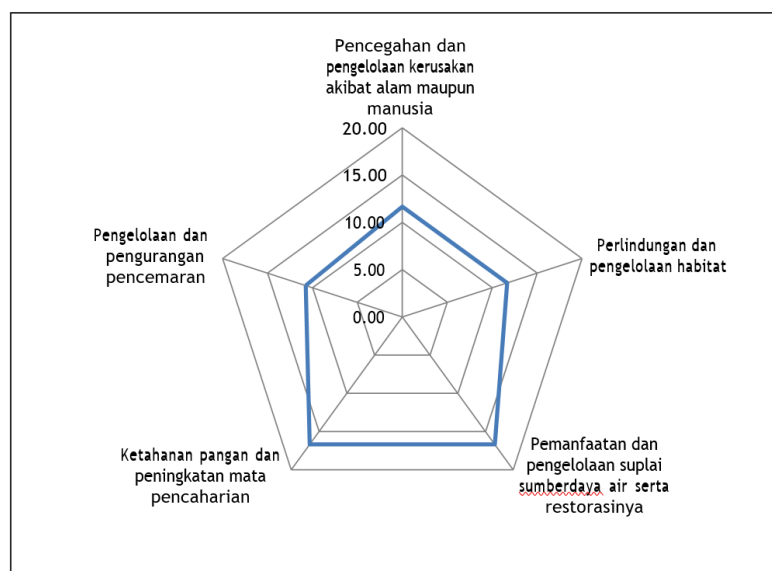
Sumber: *State of the Coast* Kabupaten Batang, 2023

Diagram radar tata kelola pesisir Kabupaten Batang menyajikan sebuah gambaran diagnostik yang menyoroti adanya kesenjangan fundamental antara fondasi perencanaan dan kapasitas implementasi. Di satu sisi, Kabupaten Batang menunjukkan kekuatan yang sangat menonjol pada pilar-pilar normatif. Hal ini terlihat jelas dari skor Legislasi yang mencapai nilai tertinggi (mendekati 18.00) serta skor Kebijakan, strategi dan rencana yang juga relatif tinggi (sekitar 13.00). Capaian ini menegaskan bahwa secara formal, daerah telah berhasil membangun landasan hukum dan dokumen perencanaan strategis yang memadai sebagai dasar pengelolaan pesisir.

Namun, kekuatan pada aspek perencanaan tersebut kontras secara drastis dengan kelemahan pada pilar-pilar operasionalnya. Tiga elemen krusial Aransemen kelembagaan, Mekanisme pembiayaan, dan Peningkatan kapasitas menunjukkan skor yang sangat rendah, bahkan mendekati nol. Kondisi kritis ini mengindikasikan adanya kelumpuhan sistemik: tidak ada lembaga atau badan koordinasi yang efektif menjalankan rencana, tidak ada alokasi anggaran yang menjamin keberlanjutan program, dan tidak ada investasi pada pengembangan kapasitas SDM. Kelemahan ini diperparah

dengan rendahnya skor pada Informasi dan penyadaran publik, yang menunjukkan minimnya sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam proses tata kelola.

Akibatnya, kesimpulan utama dari analisis ini adalah terjadinya disfungsi implementasi yang parah. Kabupaten Batang memiliki regulasi dan rencana yang baik di atas kertas, namun gagal mengeksekusinya di lapangan. Oleh karena itu, fokus intervensi ke depan tidak lagi pada penyusunan dokumen baru, melainkan harus diprioritaskan pada pembangunan pilar-pilar implementasi yang hilang. Langkah strategis yang mendesak meliputi pembentukan lembaga koordinasi yang fungsional, pengalokasian skema pembiayaan yang berkelanjutan, perancangan program peningkatan kapasitas SDM yang sistematis, serta pengembangan strategi komunikasi untuk membangun kesadaran dan partisipasi publik.



Gambar 13. Diagram Radar Posisi Antar Elemen Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Batang

Sumber: *State of the Coast* Kabupaten Batang, 2023

Diagram radar pembangunan berkelanjutan Kabupaten Batang menyoroti sebuah pola pembangunan yang sangat berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan ketahanan sosial-ekonomi. Dua

elemen yang menunjukkan skor tertinggi secara dominan adalah "Pemanfaatan dan pengelolaan suplai sumberdaya air" serta "Ketahanan pangan dan peningkatan mata pencaharian", keduanya dengan skor tinggi sekitar 15.00. Hal ini secara jelas mengindikasikan bahwa prioritas utama kebijakan daerah terfokus pada jaminan ketersediaan air bersih dan irigasi, serta penguatan fondasi ekonomi masyarakat melalui sektor-sektor yang menopang penghidupan.

Kekuatan pada aspek sosial-ekonomi tersebut juga didukung oleh skor yang relatif tinggi pada elemen "Pencegahan dan pengelolaan kerusakan akibat alam maupun manusia" (sekitar 12.50). Ini menandakan adanya kesadaran dan alokasi sumber daya yang memadai untuk mitigasi bencana dan pengelolaan risiko. Jika digabungkan, ketiga elemen terkuat ini (air, pangan, dan mitigasi bencana) membentuk sebuah strategi pembangunan yang berfokus pada ketahanan (*resilience*) dan stabilitas komunitas dalam menghadapi tekanan lingkungan dan ekonomi.

Namun, potret pembangunan ini menunjukkan ketimpangan yang signifikan ketika melihat pada pilar-pilar ekologi. Dua elemen krusial, yaitu "Perlindungan dan pengelolaan habitat" dan "Pengelolaan dan pengurangan pencemaran", keduanya menunjukkan skor terendah dengan nilai hanya sekitar 5.00. Kesenjangan yang lebar ini mengindikasikan bahwa pencapaian di sektor sosial-ekonomi belum diimbangi dengan upaya perlindungan lingkungan yang memadai. Terdapat risiko bahwa pemanfaatan sumber daya dan upaya peningkatan mata pencaharian berjalan tanpa kontrol pencemaran yang ketat atau perlindungan terhadap habitat kunci, yang dalam jangka panjang dapat merusak jasa ekosistem yang justru menopang ketahanan pangan dan suplai air itu sendiri.



Tabel 7. Matriks Rangkuman Temuan Kunci SOC dan Rekomendasi

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
1	Kebijakan dan Strategi ICM	- Profil pesisir tidak ditemukan secara khusus dalam beberapa dokumen di Kabupaten Batang - Perencanaan pembangunan di wilayah pesisir dan laut dimuat dalam Perda No. 13/2018 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 - Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Batang Tahun 2014-2034 - Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir (RSWP) Kabupaten Batang - Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2021 tentang pengarusutamaan gender memuat Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Pengarusutamaan Gender di Daerah (PUG)	- Pemerintah Kabupaten Batang masih melakukan berbagai program terkait pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan dilakukan terhadap para nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah, serta pemasar ikan skala kecil, termasuk di dalamnya adalah perempuan yang dominan bekerja di pengolah dan pemasar. - Terkait dengan kewenangan, perlu adanya Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengelolaan wilayah pesisir, sehingga keterbatasan anggaran dan SDM bisa dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan <i>stakeholder</i> terkait di Kabupaten Batang.

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
2	Aransemen Kelembagaan	- Pembangunan di wilayah pesisir dan laut dilakukan secara sendiri-sendiri oleh berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) atau instansi setingkat badan berdasarkan Perda Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. - Hingga saat ini belum ada unit kerja non-struktural yang membantu fasilitasi koordinasi antar instansi dalam percepatan pembangunan di wilayah pesisir dan laut. Sementara itu, perencanaan pembangunan di wilayah pesisir menyatu dengan perencanaan pembangunan pada umumnya. Sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 16 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.	- Bapperida Kabupaten Batang memiliki tugas dan fungsi dalam perencanaan hingga evaluasi, perlu didukung oleh unit kerja yang bersifat non- struktural. Salah satu contoh unit kerja ini adalah <i>Program Coordinating Committee</i> (PCC) dan <i>Program Management Office</i> (PMO). Keberadaan lembaga ini tidak hanya mengkoordinasikan tugas dan fungsi antara OPD/Badan yang terkait dengan pembangunan wilayah pesisir dan laut, akan tetapi juga menjadi sekretariat bersama dalam mensinkronkan dan mengharmoniskan antar program OPD/Badan.

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		- Perencanaan pembangunan mulai tingkat daerah hingga pusat dimulai dengan MUSRENBANG berdasarkan PP Nomor 8/2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, RPJPD, RPJMD, dan RKPD. - Musrenbang dilaksanakan oleh Bapperida dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Selain itu, pelibatan masyarakat juga diakomodir dalam PP Nomor 45/2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. - Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga dimuat dalam Perda Jawa Tengah Nomor 13/2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038.	- Partisipasi publik mendapatkan pengakuan dalam Musrenbang dan dikuatkan dalam peraturan daerah. Namun demikian, dalam rangka membuka akses publik secara luas pada setiap dokumen perencanaan, maka diperlukan kreativitas penyampaian dokumen dalam berbagai media informasi. Hal ini dalam rangka meningkatkan keterbukaan dan peningkatan akses publik pada dokumen.
3	Legislasi dan Kepatuhan	- Salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja program peningkatan pengendalian pencemaran dan	- Dinas Lingkungan Hidup tidak terdampak serius oleh UU No. 23 Tahun 2014, sehingga keberadaan

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		kerusakan lingkungan hidup adalah pelayanan dokumen lingkungan yang dimaksudkan sebagai instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan selama kegiatan berlangsung. - Pencegahan pencemaran air dan udara dari perusahaan yang dipantau belum sepenuhnya mentaati dokumen lingkungan maupun peraturan perundangan tentang pengelolaan lingkungan, sesuai dengan kriteria persyaratan teknis maupun administratif yang telah ditetapkan. - Pelanggaran lingkungan hidup yang terjadi dominan bersumber dari pengaduan masyarakat. - Pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan terdiri dari jumlah mediasi sengketa lingkungan dan jumlah kasus yang berlanjut ke penegakan hukum.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang sangat penting keberadaannya dalam mengawal keberlanjutan wilayah pesisir dan laut dari ancaman kerusakan. Oleh sebab itu, optimalisasi dari tugas dan fungsi pemantauan dan pengawasan terhadap praktik-praktik yang merusak perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang. - Permasalahan lingkungan hidup yang semakin kompleks memerlukan keterlibatan semua para pemangku kepentingan terkait. Selain itu diperlukan kedisiplinan, transparansi, kejujuran dan keberanian aparat

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
			dalam menegakkan hukum bagi pelanggarnya.
4	Informasi dan Penayadaran Publik	- Peningkatan kesadaran masyarakat pesisir Kabupaten Batang dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. - Terdapat Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Batang. - Penguatan kapasitas masyarakat Kabupaten Batang dilakukan melalui pembinaan kelompok. - Sudah ada portal berbasis Web yang dikelola oleh DLH namun web tersebut tidak memberi informasi yang memadai mengenai jenis program, dan kebanyakan informasi yang ditampilkan adalah informasi lama yang tidak diupdate.	- Perlu adanya pemerataan informasi melalui sosialisasi dan penayadaran masyarakat dalam peningkatan kapasitas adaptif masyarakat pesisir Kabupaten Batang dalam menghadapi perubahan iklim melalui sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lingkungan secara terintegrasi dan terpadu. - Perlu adanya pusat data dan informasi yang terpadu yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat umum. - Keberadaan sarana komunikasi berbasis web sebaiknya diupdate dan

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
			diperkaya dengan informasi terkait sumber daya. Sementara media komunikasi lain yang konvensional dapat terus dilembagakan penggunaannya.
		- Keterlibatan <i>stakeholders</i> di Kabupaten Batang masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan baik. - Belum adanya mekanisme partisipasi <i>stakeholder</i> non- pemerintah dalam kegiatan penyadaran publik. - Di Kabupaten Batang sudah dilakukan koordinasi antar <i>stakeholders</i>, akan tetapi baru sebatas event insidental dan tidak menjadi kegiatan rutin dan belum ada perencanaan bersama.	- Perlu adanya penguatan kemitraan dan memaksimalkan peluang untuk pengelolaan pesisir. - Agar kesadaran dan tanggungjawab masyarakat meningkat diperlukan pelibatan mereka dalam pengelolaan sumberdaya pesisir mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya
5	Mekanisme Pembiayaan	- Adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga kewenangan daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan wilayah pesisir	- Perlu adanya lembaga yang dapat mengkoordinasikan organisasi antar perangkat daerah (OPD) serta multi pihak sekaligus menjadi sekretariat

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		secara menjadi terbatas yang berdampak pada program perencanaan termasuk penganggarnya. - Kegiatan pengelolaan wilayah pesisir masih dilakukan secara parsial. Program pengembangan di wilayah pesisir masih menjadi urusan Dinas belum ada lembaga bersama yang menjadi sekretariat dalam melakukan koordinasi terkait pengelolaan wilayah pesisir. Pendanaan kegiatan wilayah pesisir masih berdasarkan pada penganggaran kegiatan tahunan di masing-masing OPD, belum ada aturan yang mengatur mekanisme pendanaan terkait dengan program pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dengan melibatkan multi pihak.	bersama dalam melakukan sinkronisasi program-program pembangunan wilayah pesisir secara terpadu, sekaligus mengatur mekanisme pendanaan bersama.
6	Peningkatan Kapasitas	- Program peningkatan kapasitas yang ditemukan adalah pelatihan membuat bakso berbahan dasar ikan dan pelatihan membuat rengginang cumi. Selain masih sangat sempit, tidak ada data yang menunjukkan tingkat dampak dari kegiatan ini.	- Di Kabupaten Batang sudah dilakukan koordinasi antar stakeholders tapi baru sebatas kegiatan sektoral dan belum

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		- Program peningkatan kapasitas pada bidang pengelolaan pesisir terpadu bagi kelompok khusus seperti kelompok perempuan, disabilitas dan pemuda tidak ada - Kerjasama lintas sektor dan/atau dengan lembaga pendidikan/NGO dalam program peningkatan kapasitas di bidang pengelolaan pesisir terpadu belum ada	merupakan kegiatan rutin karena baru sebatas insidental. - Alokasi pendanaan untuk kegiatan yang bersifat multi stakeholder haruslah dibangun dalam konteks pembagian tanggung jawab dan memiliki kekuatan hukum. Tanpa adanya kekuatan hukum, alokasi dana yang ditujukan bagi kegiatan bersama di luar sektor akan terhambat dengan mekanisme pertanggungjawaban.
		- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam bidang pengelolaan kawasan pesisir secara terintegrasi dan terpadu. - Masih sedikitnya program peningkatan kapasitas SDM dalam ICM.	- Perlu disusun program peningkatan kapasitas SDM dalam bidang ICM melalui program peningkatan kapasitas SDM dibidang ICM. - Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan rasa bertanggung



No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.	jawab untuk menjaga kelestarian sumberdaya secara berkelanjutan. Maka diperlukan pelibatan masyarakat yang mempunyai kapasitas dibidang pengelolaan pesisir dan lingkungan.
7	Pencegahan Kerusakan Alam dan Manusia	- Perspektif terhadap bencana masih dalam dimensi tanggap darurat dan penanganan krisis jangka pendek. - Dampak dari perubahan iklim belum terintegrasi dalam rencana penanggulangan bencana Kabupaten Batang. - Belum ada kajian mengenai dampak perubahan iklim yang terbaru dan kajian dampak secara spesifik di wilayah pesisir dan kelompok rentan. - Kapasitas publik maupun daerah untuk mengurangi kerentanan masih berada pada level yang rendah.	- Perlu ada mitigasi lintas sektor untuk mengidentifikasi tipe bencana berbasis iklim yang bersifat slow onset di Kabupaten Batang. - Diperlukan masterplan yang berisi rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk wilayah Kabupaten Batang yang bersifat memaksa agar setiap sektor dapat menyusun rencana aksi mitigasi dan adaptasi secara spesifik.

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
			- Kelembagaan bencana yang sudah ada dapat memperluas dimensi kerjanya untuk mengintegrasikan dampak perubahan iklim menjadi bagian dari Rencana Penanggulangan Bencana Daerah ataupun menjadi dokumen sejenis yang terpisah namun strategis dan dapat diimplementasikan pada tingkat birokrasi maupun masyarakat sipil.
8	Perlindungan dan Pengelolaan Habitat	- Tidak adanya dokumen perencanaan pengelolaan habitat di wilayah pesisir dan laut. - Belum tersedianya data terbaru terkait luasan dan status ekosistem pesisir. - Legalitas program perlindungan habitat pesisir, warisan alam dan budaya belum tersedia, terutama yang berada dan teridentifikasi di wilayah pesisir,	- Dokumen perencanaan yang diperlukan adalah program atau bahkan rencana aksi dalam mengelola habitat pesisir agar pemanfaatannya berkelanjutan sesuai kewenangan kabupaten.

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		atau berhubungan erat dengan kebaharian atau kemaritiman. - Adanya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah membatasi pemerintah Kabupaten Batang untuk mengelola wilayah pesisirnya.	- Pemutakhiran data secara berkala untuk habitat/ekosistem mangrove dan sumberdaya pesisir lainnya (terrestrial). - Dokumen dan legalitas hukum atau kebijakan rencana pengelolaan perlu dibuat agar upaya pengelolaan dapat lebih fokus dan efektif. - Pemerintah Kabupaten Batang dapat mengambil peran dalam mengelola wilayah pesisirnya pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai peran aktif masyarakat mengelola wilayah pesisir.
9	Pemanfaatan dan pengelolaan	- Sudah ada pengelolaan dan pengembangan sumberdaya air untuk penyediaan air baku, konservasi serta pengendalian banjir.	- Perlunya adanya sosialisasi dan pelatihan terkait teknik pemanenan

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
	Suplai Sumberdaya Air	- Pemanfaatan sumberdaya air digunakan sebagai sumber air minum dan kebutuhan air domestik serta kegiatan pertanian. - Program pemanenan air hujan telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kelangkaan air bersih dan mengurangi volume air limpasan hujan dan mengisi kembali air tanah terutama di perkotaan.	air hujan dalam rangka pengelolaan air bersih dan air minum. - Perlunya pengetatan regulasi terkait pembangunan di sekitar sempadan sumber air dan pembukaan lahan terbuka hijau.
10	Ketahanan Pangan dan Peningkatan Mata Pencaharian	- Program-program yang berkaitan dengan pembangunan di wilayah pesisir masih didominasi oleh program di sektor perikanan. - Adanya keterbatasan kewenangan dalam pengelolaan oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga terdapat beberapa program pengelolaan sumber daya seperti program rehabilitasi dan konservasi tidak lagi menjadi program prioritas pemerintah kabupaten.	- Perlu adanya kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir, baik bersifat horizontal yakni antar OPD maupun antar pemerintah kabupaten/kota lainnya maupun secara vertikal yakni kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat.

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		- Ada program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan. - Ada program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan. - Ada program pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya. - Dalam Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, dilakukan Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar. - Ada program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap. - Ada program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan. - Produksi perikanan baik perikanan tangkap dan perikanan darat perikanan mengalami fluktuasi, namun ada juga yang mengalami peningkatan yang konsisten.	- Untuk peningkatan produksi perikanan tangkap diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, terutama dalam pengelolaan ruang laut. - Produksi budidaya perikanan masih perlu didorong untuk penyediaan pakan dengan harga yang kompetitif. - Untuk itu masih dibutuhkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, akses modal dan pasar dalam mendorong peningkatan dalam bidang pengolahan dan pemasaran produk olahan perikanan. - Pencatatan data statistik perikanan belum maksimal dibuat secara series tahunan. Namun demikian, data

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		- Perkembangan data produksi perikanan di Kabupaten Batang belum tersedia seluruhnya secara series tahunan.	perikanan merupakan data yang sangat dinamis, sehingga dibutuhkan data yang lebih rinci dan lengkap dengan periode bulanan.
		- Kasus gizi buruk di Kabupaten Batang mempunyai kecenderungan terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. - Berdasarkan pada hasil penghitungan pengukuran pencapaian kinerja sasaran tersebut diatas, dengan membandingkan antara target dengan realisasi berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, maka dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020 dikategorikan sangat berhasil/sangat baik, dengan nilai rata-rata 111.69%. - Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan di Kabupaten Batang, maka masih banyak berbagai kondisi yang dihadapi	- Rekomendasi bagi Pemda Kabupaten Batang dalam meningkatkan status gizi masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat adalah melalui upaya penyediaan sumberdaya (manusia, sarana dan prasarana) kesehatan yang memadai. Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal lain secara terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja menjadi lebih baik,

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		oleh Dinas Kesehatan yang perlu segera mendapatkan pemecahan masalah.	
		- Kondisi kemiskinan di Kabupaten Batang: 1) Jumlah penduduk miskin berfluktuasi namun mengalami perbaikan; 2) Garis Kemiskinan semakin meningkat; 3) - Indeks Kedalaman Kemiskinan berfluktuasi antar periode namun menunjukkan tren peningkatan; dan 4) Indeks Keparahan Kemiskinan berfluktuasi antar periode namun menunjukkan tren peningkatan; - Publikasi hasil kinerja program dan kegiatan pengentasan kemiskinan belum optimal; 6,64% (30.301 jiwa) angkatan kerja masih belum mendapatkan pekerjaan/pengangguran.	- Untuk pengentasan masalah kemiskinan: Meningkatkan dan memperluas strategi dan program yang telah dijalankan serta aktif melakukan diseminasi hasil program dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Sedangkan untuk urusan kependidikan, perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi,
		- Potensi sumberdaya manusia dalam segala usaha yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan berjumlah 1.4924 orang (terdiri dari nelayan: 11.745 orang, pengolah dan pemasar hasil perikanan: 1.088 orang, dan pembudidaya: 2.091 orang).	- Dibutuhkan adanya program regenerasi yang memancing minat generasi muda bekerja pada sektor perikanan. Program-program pengembangan mata pencaharian

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		- Program-program pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Batang, dilakukan melalui Program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan. - Terdapat program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan.	masyarakat di wilayah pesisir tidak hanya menjadi urusan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan saja, melainkan harus melibatkan instansi lainnya. Dengan demikian, dibutuhkan lembaga yang dapat menjadi sekretariat bersama untuk mendukung ekosistem pengembangan masyarakat pesisir baik dari segi kebijakan maupun anggaran pengembangan programnya.
11	Pengurangan Pencemaran dan Dampak Pencemaran	- Program pengelolaan pencemaran dan limbah B3 masih fokus di darat, dan belum secara khusus untuk wilayah pesisir. - Program pengelolaan dan pengendalian pencemaran dan limbah B3 untuk masyarakat masih	- Menyusun rencana pengurangan pencemaran dan dampak pencemaran dengan memasukkan wilayah pesisir dan laut. - Menyusun rencana pengelolaan pencemaran secara terstruktur secara

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		belum terdokumentasi secara khusus dari dokumen yang diterima, hanya untuk inovasi sampah. - Pemantauan terkait dampak pencemaran terhadap masyarakat belum dilakukan, terutama terkait dampak limbah B3 terhadap kesehatan masyarakat jangka panjang.	terpisah, berdasarkan kategori jenis dan sumber pencemar. - Upaya penyadartahuan dari level masyarakat dan pelaku industri hendaknya lebih intensif dilakukan. Program pengelolaan dampak kepada masyarakat, terutama limbah B3, harus dilakukan secara berkala. Hal ini terkait dampak yang tidak langsung muncul saat kejadian pencemaran.
		- Ada program Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik. - Ada program Pengurangan Sampah. - Kabupaten Batang telah melaksanakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, data yang tersedia adalah data IKLH tahun 2017-2021. Adapun data nilai IKLH pada tahun 2021 adalah 68,44.	- Adapun program untuk bidang sanitasi yang dilakukan adalah peningkatan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyediaan kebutuhan sanitasi juga sarana air bersih yang memadai sesuai jumlah desa dan KK, dan

No	Indikator	Temuan Kunci	Rekomendasi
		- Jumlah volume air yang disalurkan pada pelanggan PDAM Sendang Kamulyan Batang Menurut Kantor Pelayanan dan Jenis Pelanggan (Meter Kubik) Tahun 2021, tertinggi disalurkan pada pelanggan Rumah Tangga (93,37%), diikuti oleh pelanggan sosial umum (2,39%).	pengelolaan limbah domestik yang lebih komprehensif. - Diharapkan ketersediaan data yang lebih lengkap agar monitoring dan evaluasi akan bidang sanitasi dan pengelolaan limbah domestik dapat dilakukan dengan lebih baik.



Tabel 8. Matriks integrasi temuan SOC dengan isu strategis pada RPJMD dan FGD

No	Temuan SOC		Isu RPJMD	Isu FGD
	Indikator	Temuan Kunci		
1	Kebijakan dan Strategi ICM	- Profil pesisir tidak ditemukan secara khusus dalam beberapa dokumen di Kabupaten Batang - Perencanaan pembangunan di wilayah pesisir dan laut dimuat dalam Perda No. 13/2018 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038. - Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Batang Tahun 2014-2034. - Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2011 tentang. Rencana	- Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, profesional, dan inovatif - Konektivitas wilayah dalam mendukung daya saing daerah.	- Penegakan hukum.

No	Temuan SOC		Isu RPJMD	Isu FGD
	Indikator	Temuan Kunci		
		Strategis Wilayah Pesisir (RSWP) Kabupaten Batang. - Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2021 tentang pengarusutamaan gender memuat Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Pengarusutamaan Gender di Daerah (PUG).		
2	Aransemen Kelembagaan	- Pembangunan di wilayah pesisir dan laut dilakukan secara sendiri-sendiri oleh berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) atau instansi setingkat badan berdasarkan Perda Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8	- Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, profesional, dan inovatif. - Konektivitas wilayah dalam mendukung daya saing daerah. - Stabilitas dan kondusivitas wilayah.	- Penegakan hukum.

No	Temuan SOC		Isu RPJMD	Isu FGD
	Indikator	Temuan Kunci		
		tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. - Hingga saat ini belum ada unit kerja non-struktural yang membantu fasilitasi koordinasi antar instansi dalam percepatan pembangunan di wilayah pesisir dan laut. Sementara itu, perencanaan pembangunan di wilayah pesisir menyatu dengan perencanaan pembangunan pada umumnya. Sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 16 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.		

No	Temuan SOC		Isu RPJMD	Isu FGD
	Indikator	Temuan Kunci		
		- Perencanaan pembangunan mulai tingkat daerah hingga pusat dimulai dengan MUSRENBANG berdasarkan PP Nomor 8/2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, RPJPD, RPJMD, dan RKPD. - Musrenbang dilaksanakan oleh Bapperida dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Selain itu, pelibatan masyarakat juga diakomodir dalam PP Nomor 45/2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. - Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan		

No	Temuan SOC		Isu RPJMD	Isu FGD
	Indikator	Temuan Kunci		
		pulau-pulau kecil juga dimuat dalam Perda Jawa Tengah Nomor 13/2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038.		
3	Legislasi dan Kepatuhan	- Salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja program peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah pelayanan dokumen lingkungan yang dimaksudkan sebagai instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	- Degradasi lingkungan dan dampak perubahan iklim. - <i>Clean industrial city.</i>	- Alih fungsi lahan - Penebangan liar - Kerusakan kawasan mangrove - Degradasi kehati - Kesadaran pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat - Limbah - Rusaknya kawasan konservasi - Pembangunan industri - Pengelolaan sampah - Sanitasi air limbah domestik

No	Temuan SOC		Isu RPJMD	Isu FGD
	Indikator	Temuan Kunci		
		yang mungkin ditimbulkan selama kegiatan berlangsung. - Pencegahan pencemaran air dan udara dari perusahaan yang dipantau belum sepenuhnya mentaati dokumen lingkungan maupun peraturan perundangan tentang pengelolaan lingkungan, sesuai dengan kriteria persyaratan teknis maupun administratif yang telah ditetapkan. - Pelanggaran lingkungan hidup yang terjadi dominan bersumber dari pengaduan masyarakat. - Pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan terdiri dari jumlah mediasi sengketa lingkungan dan jumlah kasus		

No	Temuan SOC		Isu RPJMD	Isu FGD
	Indikator	Temuan Kunci		
		yang berlanjut ke penegakan hukum.		
4	Informasi dan Penyadaran Publik	- Peningkatan kesadaran masyarakat pesisir Kabupaten Batang dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. - Terdapat Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Batang. - Penguatan kapasitas masyarakat Kabupaten Batang dilakukan melalui pembinaan kelompok. - Sudah ada portal berbasis Web yang dikelola oleh DLH namun	- Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan ramah lingkungan dalam mendukung kenyamanan hidup Masyarakat - Kualitas SDM dan daya Saing Tenaga Kerja - Konektivitas wilayah dalam mendukung daya saing daerah	- Kesadaran pemerintah, pelaku usaha , masyarakat - Kesadaran masyarakat rendah terhadap sampah - Rawan penyakit - Hilangnya mata pencaharian - Pemberdayaan masyarakat - Kesejahteraan menurun

No	Temuan SOC		Isu RPJMD	Isu FGD
	Indikator	Temuan Kunci		
		web tersebut tidak memberi informasi yang memadai mengenai jenis program, dan kebanyakan informasi yang ditampilkan adalah informasi lama yang tidak diupdate.		
		- Keterlibatan <i>stakeholders</i> di Kabupaten Batang masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan baik. - Belum adanya mekanisme partisipasi <i>stakeholder</i> non-pemerintah dalam kegiatan penyadaran publik. - Di Kabupaten Batang sudah dilakukan koordinasi antar - <i>stakeholders</i>, akan tetapi baru sebatas event insidental dan tidak menjadi kegiatan rutin dan	- Tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan inovatif - Stabilitas dan kondusivitas wilayah - Konektivitas wilayah dalam mendukung daya saing daerah	- Penegakan hukum - Pemberdayaan masyarakat

No	Temuan SOC		Isu RPJMD	Isu FGD
	Indikator	Temuan Kunci		
		belum ada perencanaan bersama.		
5	Mekanisme Pembiayaan	- Adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga kewenangan daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan wilayah pesisir secara menjadi terbatas yang berdampak pada program perencanaan termasuk penganggarannya. - Kegiatan pengelolaan wilayah pesisir masih dilakukan secara parsial. Program pengembangan di wilayah pesisir masih menjadi urusan Dinas belum ada lembaga bersama yang menjadi sekretariat dalam melakukan	- Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, profesional, dan inovatif - Konektivitas wilayah dalam mendukung daya saing daerah - Stabilitas dan kondusivitas wilayah	- Penegakan hukum

No	Temuan SOC		Isu RPJMD	Isu FGD
	Indikator	Temuan Kunci		
		koordinasi terkait pengelolaan wilayah pesisir. Pendanaan kegiatan wilayah pesisir masih berdasarkan pada penganggaran kegiatan tahunan di masing-masing OPD, belum ada aturan yang mengatur mekanisme pendanaan terkait dengan program pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dengan melibatkan multi pihak.		
6	Peningkatan Kapasitas	- Program peningkatan kapasitas yang ditemukan adalah pelatihan membuat bakso berbahan dasar ikan dan pelatihan membuat rengginang cumi. Selain masih sangat sempit, tidak ada data yang	- Pengentasan kemiskinan. - Penyediaan infrastruktur yang berkualitas,berkelanjutan, dan ramah lingkungan dalam mendukung kenyamanan hidup Masyarakat.	- Pemberdayaan Masyarakat.

No	Temuan SOC		Isu RPJMD	Isu FGD
	Indikator	Temuan Kunci		
		menunjukkan tingkat dampak dari kegiatan ini. - Program peningkatan kapasitas pada bidang pengelolaan pesisir terpadu bagi kelompok khusus seperti kelompok perempuan, disabilitas dan pemuda tidak ada. - Kerjasama lintas sektor dan/atau dengan lembaga pendidikan/NGO dalam program peningkatan kapasitas di bidang pengelolaan pesisir terpadu belum ada.	- Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata berbasis industri dan pariwisata.	
		- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam bidang pengelolaan kawasan pesisir secara terintegrasi dan terpadu.	- Konektivitas wilayah dalam mendukung daya saing daerah.	- Kesadaran pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. - Pemberdayaan Masyarakat.

No	Temuan SOC		Isu RPJMD	Isu FGD
	Indikator	Temuan Kunci		
		- Masih sedikitnya program peningkatan kapasitas SDM dalam ICM. - Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.		
7	Pencegahan Kerusakan Alam dan Manusia	- Perspektif terhadap bencana masih dalam dimensi tanggap darurat dan penanganan krisis jangka pendek. - Dampak dari perubahan iklim belum terintegrasi dalam rencana penanggulangan bencana Kabupaten Batang. - Belum ada kajian mengenai dampak perubahan iklim yang terbaru dan kajian dampak	- Degradasi lingkungan dan dampak perubahan iklim. - <i>Clean Industrial City</i>	- Ahli fungsi lahan - Penebangan liar - Kerusakan kawasan mangrove - Kenaikan permukaan air laut - Polusi sampah plastik - Perburuan lobster/satwa - Degradasi kehati - Sedimentasi - Overfishing - Penegakan hukum - Kesadaran pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat

No	Temuan SOC		Isu RPJMD	Isu FGD
	Indikator	Temuan Kunci		
		secara spesifik di wilayah pesisir dan kelompok rentan. - Kapasitas publik maupun daerah untuk mengurangi kerentanan masih berada pada level yang rendah.		- Penyempitan area tangkap ikan - Rusaknya muara sungai - Limbah - Rusak kawasan konservasi - Pembangunan industri
8	Perlindungan dan Pengelolaan Habitat	- Tidak adanya dokumen perencanaan pengelolaan habitat di wilayah pesisir dan laut. - Belum tersedianya data terbaru terkait luasan dan status ekosistem pesisir. - Legalitas program perlindungan habitat pesisir, warisan alam dan budaya belum tersedia, terutama yang berada dan teridentifikasi di wilayah pesisir,	- Degradasi lingkungan dan dampak perubahan iklim. - <i>Clean Industrial City</i>	- Ahli fungsi lahan - Penebangan liar - Kerusakan kawasan mangrove - Kenaikan permukaan air laut - Polusi sampah plastik - Perburuan lobster/satwa - Degradasi kehati - Sedimentasi - Overfishing - Penegakan hukum - Kesadaran pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat - Penyempitan area tangkap ikan

No	Temuan SOC		Isu RPJMD	Isu FGD
	Indikator	Temuan Kunci		
		atau berhubungan erat dengan kebaharian atau kemaritiman. - Adanya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah membatasi pemerintah Kabupaten Batang untuk mengelola wilayah pesisirnya.		- Rusaknya muara sungai - Limbah - Rusak kawasan konservasi - Pembangunan industri
9	Pemanfaatan dan pengelolaan Suplai Sumberdaya Air	- Sudah ada pengelolaan dan pengembangan sumberdaya air untuk penyediaan air baku, konservasi serta pengendalian banjir. - Pemanfaatan sumberdaya air digunakan sebagai sumber air minum dan kebutuhan air domestik serta kegiatan pertanian. - Program pemanenan air hujan telah dilakukan oleh pemerintah	- Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan ramah lingkungan dalam mendukung kenyamanan hidup masyarakat - Degradasi lingkungan dan dampak perubahan iklim. - <i>Clean Industrial City.</i>	- Air bersih - Lapak penjualan TPI - Pengelolaan sampah - Pemadam kebakaran - Rumah tidak layak huni - Sanitasi air limbah domestik - Infrastruktur jl. Lingkungan - Permukiman kumuh - Kesadaran masyarakat rendah terhadap sampah - Drainase buruk - Rawan penyakit

No	Temuan SOC		Isu RPJMD	Isu FGD
	Indikator	Temuan Kunci		
		untuk mengatasi permasalahan kelangkaan air bersih dan mengurangi volume air limpasan hujan dan mengisi kembali air tanah terutama di perkotaan.		- Rob - Banjir - Sedimentasi sungai - Intrusi air laut
10	Ketahanan Pangan dan Peningkatan Mata Pencapaian	- Program-program yang berkaitan dengan pembangunan di wilayah pesisir masih didominasi oleh program di sektor perikanan. - Adanya keterbatasan kewenangan dalam pengelolaan oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga terdapat beberapa program pengelolaan sumber daya seperti program rehabilitasi dan konservasi tidak	- Pengentasan kemiskinan - Ketahanan pangan yang berkelanjutan - Kualitas SDM dan daya Saing Tenaga Kerja - Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata berbasis industri dan pariwisata	- Alih fungsi lahan pertanian dan perikanan tinggi - Penurunan hasil pertanian di kawasan pesisir - Penurunan produksi perikanan dan pertanian - Hilangnya mata pencaharian - Rendahnya teknologi pengolahan hasil perikanan - Kesejahteraan menurun - Pemberdayaan masyarakat - Diversifikasi produk

No	Temuan SOC		Isu RPJMD	Isu FGD
	Indikator	Temuan Kunci		
		lagi menjadi program prioritas pemerintah kabupaten.		- Pemasaran produk umum dan ekraf - Pendanaan pengembangan usaha pelaku ekraf dan UMKM. - Kualitas produk dan packaging. - Pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. - Kontinuitas produk UMKM.
		- Ada program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan. - Ada program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan. - Ada program pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya.	- Pengentasan kemiskinan. - Ketahanan pangan yang berkelanjutan. - Kualitas SDM dan daya Saing Tenaga Kerja. - Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata berbasis industri dan pariwisata.	- Alih fungsi lahan pertanian dan perikanan tinggi. - Penurunan hasil pertanian di kawasan pesisir - Penurunan produksi perikanan dan pertanian. - Hilangnya mata pencaharian. - Rendahnya teknologi pengolahan hasil perikanan. - Kesejahteraan menurun.

No	Temuan SOC		Isu RPJMD	Isu FGD
	Indikator	Temuan Kunci		
		- Dalam Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, dilakukan Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar. - Ada program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap. - Ada program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan. - Produksi perikanan baik perikanan tangkap dan perikanan darat perikanan mengalami fluktuasi, namun ada juga yang mengalami peningkatan yang konsisten. - Perkembangan data produksi perikanan di Kabupaten Batang		- Pemberdayaan masyarakat - Diversifikasi produk - Pemasaran produk umum dan ekraf - Pendanaan pengembangan usaha pelaku ekraf dan UMKM - Kualitas produk dan packaging - Pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah - Kontinuitas produk UMKM

No	Temuan SOC		Isu RPJMD	Isu FGD
	Indikator	Temuan Kunci		
		belum tersedia seluruhnya secara series tahunan.		
		- Kasus gizi buruk di Kabupaten Batang mempunyai kecenderungan terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. - Berdasarkan pada hasil penghitungan pengukuran pencapaian kinerja sasaran tersebut diatas, dengan membandingkan antara target dengan realisasi berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, maka dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020 dikategorikan sangat	- Pengentasan kemiskinan - Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata berbasis industri dan pariwisata.	- Pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. - Kesejahteraan menurun - Pemberdayaan masyarakat - Hilangnya mata pencaharian - Rumah tidak layak huni - Pemukiman kumuh - Rawan penyakit

No	Temuan SOC		Isu RPJMD	Isu FGD
	Indikator	Temuan Kunci		
		berhasil/sangat baik, dengan nilai rata-rata 111.69%. - Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan di Kabupaten Batang, maka masih banyak berbagai kondisi yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan yang perlu segera mendapatkan pemecahan masalah.		
		- Kondisi kemiskinan di Kabupaten Batang: 1) Jumlah penduduk miskin berfluktuasi namun mengalami perbaikan; 2) Garis Kemiskinan semakin meningkat; 3). - Indeks Kedalaman Kemiskinan berfluktuasi antar periode namun menunjukan tren	- Pengentasan kemiskinan - Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata berbasis industri dan pariwisata.	- Pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah - Kesejahteraan menurun - Pemberdayaan masyarakat - Hilangnya mata pencaharian - Rumah tidak layak huni - Pemukiman kumuh - Rawan penyakit

No	Temuan SOC		Isu RPJMD	Isu FGD
	Indikator	Temuan Kunci		
		peningkatan; dan 4) Indeks Keparahan Kemiskinan berfluktuasi antar periode namun menunjukkan tren peningkatan; - Publikasi hasil kinerja program dan kegiatan pengentasan kemiskinan belum optimal; 6,64% (30.301 jiwa) angkatan kerja masih belum mendapatkan pekerjaan/pengangguran.		
		- Potensi sumberdaya manusia dalam segala usaha yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan berjumlah 1.4924 orang (terdiri dari nelayan: 11.745 orang, pengolah dan pemasar hasil	- Kualitas SDM dan daya Saing Tenaga Kerja - Konektivitas wilayah dalam mendukung daya saing daerah.	- Pemberdayaan masyarakat - Kontinuitas produk UMKM

No	Temuan SOC		Isu RPJMD	Isu FGD
	Indikator	Temuan Kunci		
		perikanan: 1.088 orang, dan pembudidaya: 2.091 orang). - Program-program pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Batang, dilakukan melalui Program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan. - Terdapat program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan.		
11	Pengurangan Pencemaran dan Dampak Pencemaran	- Program pengelolaan pencemaran dan limbah B3 masih fokus di darat, dan belum secara khusus untuk wilayah pesisir.	- Degradasi lingkungan dan dampak perubahan iklim. - Clean Industrial City - Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan	- Air Bersih - Pengelolaan Sampah - RTLH - Sanitasi Air Limbah Domestik - Permukiman Kumuh

No	Temuan SOC		Isu RPJMD	Isu FGD
	Indikator	Temuan Kunci		
		- Program pengelolaan dan pengendalian pencemaran dan limbah B3 untuk masyarakat masih belum terdokumentasi secara khusus dari dokumen yang diterima, hanya untuk inovasi sampah. - Pemantauan terkait dampak pencemaran terhadap masyarakat belum dilakukan, terutama terkait dampak limbah B3 terhadap kesehatan masyarakat jangka panjang.	ramah lingkungan dalam mendukung kenyamanan hidup masyarakat	- Kesadaran Masyarakat Rendah terhadap sampah - Drainase Buruk - Rawan Penyakit
		- Ada program Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik. - Ada program Pengurangan Sampah.	- Degradasi lingkungan dan dampak perubahan iklim - Clean Industrial City - Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan ramah lingkungan dalam	- Air Bersih - Pengelolaan Sampah - RTLH - Sanitasi Air Limbah Domestik - Permukiman Kumuh

No	Temuan SOC		Isu RPJMD	Isu FGD
	Indikator	Temuan Kunci		
		- Kabupaten Batang telah melaksanakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, data yang tersedia adalah data IKLH tahun 2017-2021. Adapun data nilai IKLH pada tahun 2021 adalah 68,44. - Jumlah volume air yang disalurkan pada pelanggan PDAM Sendang Kamulyan Batang Menurut Kantor Pelayanan dan Jenis Pelanggan (Meter Kubik) Tahun 2021, tertinggi disalurkan pada pelanggan Rumah Tangga (93,37%), diikuti oleh pelanggan sosial umum (2,39%).	mendukung kenyamanan hidup masyarakat	- Kesadaran Masyarakat Rendah terhadap sampah - Drainase Buruk - Rawan Penyakit

BAB IV

KELEMBAGAAN

Proses penyusunan Rencana Pengelolaan Pesisir Terpadu Kabupaten Batang dilaksanakan secara partisipatif melalui pembentukan tim kerja lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, maupun dunia usaha. Tim kerja ini bertugas untuk merumuskan tujuan pengelolaan, mengidentifikasi dan memetakan isu-isu strategis pesisir, serta menyusun strategi dan rencana aksi yang konkret untuk diimplementasikan dalam jangka menengah dan panjang.

Pembentukan tim tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati Batang Nomor 100.3.3.2/424 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Kabupaten Batang, yang berfungsi sebagai wadah koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program lintas sektor dalam rangka mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan.

Tabel 9. Struktur Kelompok Kerja Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Kabupaten Batang

No	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Jabatan dalam Tim
A. TIM KOORDINASI		
1	Bupati Batang	Pengarah
2	Sekretaris Daerah	Ketua
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Batang	Sekretaris



No	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Jabatan dalam Tim
4	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batang	Anggota
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Batang	Anggota
6	Kepala Dinas Sosial Kab. Batang	Anggota
7	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Anggota
8	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Batang	Anggota
9	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kab. Batang	Anggota
10	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Batang	Anggota
11	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batang	Anggota
12	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Batang	Anggota
13	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Batang	Anggota
14	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Batang	Anggota
15	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang	Anggota
16	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Batang	Anggota
17	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batang	Anggota
18	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Batang	Anggota
19	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Batang	Anggota

No	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Jabatan dalam Tim
B. TIM AHLI		
1	Perwakilan Universitas Selamat Sri Kabupaten Batang	Anggota
2	Perwakilan Program Studi di Luar Kampus Utama Universitas Diponegoro Kabupaten Batang	Anggota
C. TIM KEMITRAAN		
1	Perwakilan Racika Palm	Anggota
2	Perwakilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia	Anggota
3	Perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	Anggota
4	Perwakilan Paguyuban Lautan Sehat	Anggota
5	Perwakilan Kontak Tani Nelayan Andalan	Anggota
6	Perwakilan Kelompok Nelayan Roban Timur	Anggota
7	Perwakilan Kelompok Masyarakat Pengawas	Anggota
8	Perwakilan Kelompok Wanita Pesisir	Anggota
9	Perwakilan PT. Bhimasena Power Indonesia	Anggota
10	Perwakilan PT. Kawasan Industri Terpadu Batang	Anggota
D. TIM KERJA EKONOMI		
1	Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida Kab. Batang	Anggota
2	Kabid Usaha dan Pengelolaan TPI Dislutkan Kab. Batang	Anggota
3	Kabid Perikanan Budidaya Dislutkan Kab. Batang	Anggota
4	Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kab. Batang	Anggota

No	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Jabatan dalam Tim
5	Kabid Perdagangan Disperindagkop dan UKM Kab. Batang	Anggota
6	Kabid Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Disperindagkop dan UKM Kab. Batang	Anggota
7	Kabid Ekonomi Kreatif Disparpora Kab. Batang	Anggota
8	Kabid Destinasi dan Usaha Pariwisata Disparpora Kab. Batang	Anggota
9	Kabid Hortikultura Dispaperta Kab. Batang	Anggota
10	Kabid Tanaman Pangan Dispaperta Kab. Batang	Anggota
11	Kabid Kawasan Permukiman DPRKP Kab. Batang	Anggota
E. TIM KERJA SOSIAL		
1	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kab. Batang	Anggota
2	Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Batang	Anggota
3	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kab. Batang	Anggota
4	Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP3AP2KB Kab. Batang	Anggota
5	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kab. Batang	Anggota
6	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dispermasdes Kab. Batang	Anggota
7	Kabid Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Batang	Anggota
8	Kabid Pembinaan SD Disdikbud Kab. Batang	Anggota
9	Kabid Pembinaan SMP Disdikbud Kab. Batang	Anggota

No	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Jabatan dalam Tim
10	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kab. Batang	Anggota
11	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab. Batang	Anggota
F. TIM KERJA EKOLOGI DAN SUMBER DAYA ALAM		
1	Kabid Tata Lingkungan DLH Kab. Batang	Anggota
2	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kab. Batang	Anggota
3	Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun DLH Kab. Batang	Anggota
G. TIM KERJA INFRASTRUKTUR DAN SANITASI		
1	Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bapperida Kab. Batang	Anggota
2	Kabid Pengairan DPUPR Kab. Batang	Anggota
3	Kabid Sanitasi dan Pengembangan Permukiman DPUPR Kab. Batang	Anggota
4	Kabid Penataan Ruang DPUPR Kab. Batang	Anggota

Sinergi antar tingkat pemerintahan merupakan kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi ini perlu diwujudkan melalui pelaksanaan program-program terpadu yang tidak hanya memperkuat koordinasi lintas sektor, tetapi juga meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh pemangku kepentingan terhadap pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya pesisir. Dalam konteks tersebut, pelibatan masyarakat menjadi komponen yang tidak terpisahkan



dari proses perencanaan dan implementasi. Partisipasi aktif masyarakat pesisir, khususnya nelayan, petambak, kelompok perempuan dan orang muda, akan memperkuat dimensi sosial-ekonomi dan ketangguhan lokal, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap sumber daya pesisir yang mereka manfaatkan.

Tujuan akhir dari seluruh inisiatif ini adalah terwujudnya Kabupaten Batang yang tangguh dan berdaya saing melalui pengelolaan pesisir yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan. Dengan kolaborasi yang kuat dan sinergi yang harmonis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, harapan untuk mengamankan sekaligus memajukan wilayah pesisir Batang menjadi lebih nyata. Melalui pengelolaan yang terencana, berbasis data, dan berorientasi pada keberlanjutan, wilayah pesisir Kabupaten Batang dapat berfungsi tidak hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai sistem ekologis yang lestari bagi generasi mendatang.



BAB V**STRATEGI DAN RENCANA KEGIATAN****5.1. Sintesis Isu Strategis****1. Isu Strategis Sosial–Ekonomi Pesisir – Kabupaten Batang**

Isu sosial–ekonomi pesisir Kabupaten Batang menunjukkan pola kerentanan struktural yang cukup serius, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan tangkap dan pertanian skala kecil. Keterbatasan teknologi budidaya, fluktuasi hasil tangkapan, penurunan produktivitas lahan, serta ketergantungan pada jenis mata pencaharian tradisional menyebabkan pendapatan rumah tangga pesisir sangat tidak stabil. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya akses pelatihan vokasional, dan belum optimalnya regenerasi tenaga kerja sektor maritim, sehingga SDM pesisir masih kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan diversifikasi usaha.

Isu kemiskinan, stunting, dan ketimpangan layanan dasar menjadi indikator nyata lemahnya fondasi sosial warga pesisir, sementara kapasitas UMKM dan kelompok usaha belum berkembang karena akses modal, pemasaran, dan inovasi yang masih terbatas. Dari sisi kelembagaan, implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir belum terintegrasi lintas sektor dan masih bersifat parsial, sehingga tidak mampu menjawab kebutuhan struktural masyarakat pesisir secara komprehensif. Kombinasi faktor-faktor ini menghasilkan tantangan besar bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pesisir Batang, sekaligus menuntut strategi pemberdayaan ekonomi biru, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan kelembagaan daerah.



2. Isu Strategis Ekologi dan Sumber Daya Alam Pesisir – Kabupaten Batang

Kondisi ekologis dan sumber daya alam pesisir Kabupaten Batang menunjukkan tekanan yang tinggi dan meluas, dipicu oleh kerusakan mangrove, abrasi pantai, banjir rob, sedimentasi muara sungai, dan menurunnya kualitas air akibat pencemaran domestik maupun industri. Kerusakan habitat pesisir seperti mangrove dan vegetasi pantai berdampak langsung pada hilangnya fungsi perlindungan alami terhadap abrasi dan intrusi air laut, serta melemahkan kapasitas ekosistem dalam menopang sumber daya perikanan. Alih fungsi lahan dan aktivitas ekonomi pesisir yang tidak terkontrol semakin memperbesar degradasi lingkungan, sementara pengawasan dan penegakan regulasi belum optimal akibat lemahnya koordinasi antar-OPD dan keterbatasan kapasitas teknis.

Selain itu, adaptasi terhadap perubahan iklim belum terintegrasi secara kuat ke dalam perencanaan wilayah pesisir, padahal wilayah ini berada pada zona yang sangat rentan terhadap kenaikan muka air laut dan ekstrem cuaca. Keberadaan RAD API Kabupaten Batang dapat menjadi panduan untuk mengintegrasikan program responsif iklim dalam perencanaan pembangunan, termasuk di wilayah pesisir. Minimnya ketersediaan data ekologis yang mutakhir serta belum adanya sistem pemantauan habitat dan kualitas air yang berkelanjutan membuat proses pengambilan keputusan tidak berbasis bukti yang kuat. Akumulasi tekanan ekologis ini berdampak pada penurunan produktivitas perikanan, meningkatnya risiko bencana, dan berkurangnya daya dukung wilayah pesisir Batang secara keseluruhan.

3. Isu Strategis Sanitasi dan Infrastruktur Pesisir – Kabupaten Batang

Isu sanitasi dan infrastruktur pesisir di Kabupaten Batang memperlihatkan tantangan besar dalam pemenuhan layanan dasar dan



ketahanan fisik kawasan pesisir terhadap dinamika lingkungan. Permukiman kumuh dan tidak teratur di sepanjang pesisir menjadi persoalan utama yang memicu munculnya sanitasi buruk, penyebaran penyakit berbasis lingkungan, serta meningkatnya kerentanan sosial. Keterbatasan akses air bersih akibat intrusi air laut dan degradasi daerah tangkapan air semakin memperburuk daya dukung lingkungan bagi masyarakat pesisir.

Sementara itu, infrastruktur pendukung seperti drainase, pengelolaan sampah, pengolahan limbah domestik, dan fasilitas MCK masih jauh dari memadai. Infrastruktur perikanan—dermaga, tambatan perahu, Pangkalan Pendaratan Ikan, *cold storage*—juga belum optimal dalam mendukung rantai pasok perikanan yang efisien dan adaptif terhadap perubahan iklim. Kerusakan infrastruktur pesisir akibat abrasi, rob, serta sedimentasi muara menunjukkan bahwa banyak fasilitas publik belum dirancang dengan pendekatan adaptasi perubahan iklim. Secara keseluruhan, kondisi sanitasi dan infrastruktur pesisir Batang memerlukan intervensi komprehensif berupa penataan permukiman, peningkatan layanan dasar, pengelolaan limbah terpadu, dan pembangunan infrastruktur pesisir yang adaptif, berkelanjutan, dan mendukung ekonomi lokal.

Tabel 10. Isu strategis berdasarkan kelompok isu besar Kabupaten Batang

Kelompok Isu Besar	Sub-Isu	Akar Permasalahan	Dampak Strategis
1. Sosial– Ekonomi Pesisir	Kemiskinan pesisir; pendapatan nelayan fluktuatif; ketergantungan pada perikanan/pertanian tradisional; rendahnya keterampilan &	SDM rendah; keterbatasan akses modal & pasar; diversifikasi usaha minim; teknologi budidaya & pascapanen	Kemiskinan berulang; produktivitas rendah; UMKM tidak berkembang; kapasitas adaptasi rendah;

Kelompok Isu Besar	Sub-Isu	Akar Permasalahan	Dampak Strategis
	literasi ekonomi; stunting; pendidikan rendah; UMKM pesisir lemah; minim inovasi & teknologi; regenerasi pelaku usaha rendah	terbatas; kelembagaan nelayan/UMKM belum kuat; program pemberdayaan tidak terintegrasi; ketimpangan layanan dasar	ketahanan ekonomi pesisir lemah; rentan guncangan iklim & pasar; daya saing daerah menurun
2. Ekologi & Sumber Daya Alam Pesisir	Abrasi; rob; kerusakan mangrove; sedimentasi muara; pencemaran industri & domestik; sampah pesisir; alih fungsi lahan; kualitas air menurun; degradasi habitat; intrusi air laut; tekanan perubahan iklim	Pengawasan lemah; data ekosistem tidak mutakhir; penegakan regulasi kurang efektif; koordinasi antar-OPD rendah; penataan ruang tidak konsisten; rehabilitasi terbatas; adaptasi perubahan iklim belum terintegrasi; perilaku masyarakat kurang mendukung	Kehilangan fungsi ekologis; risiko bencana meningkat; stok ikan menurun; air bersih terbatas; biaya pemulihan tinggi; menurunnya daya dukung wilayah; hilangnya potensi wisata & ekonomi biru

Kelompok Isu Besar	Sub-Isu	Akar Permasalahan	Dampak Strategis
3. Sanitasi & Infrastruktur Pesisir	Permukiman kumuh & tidak tertata; kekurangan air bersih; sanitasi buruk; MCK terbatas; drainase tidak memadai; sampah & limbah meningkat; kerusakan jalan & bangunan pesisir; pendangkalan muara; infrastruktur perikanan tidak memadai	Infrastruktur dasar tidak adaptif; minim investasi sanitasi; air tanah dieksploitasi berlebih; intrusi air laut; tata ruang tidak disiplin; pengelolaan limbah & persampahan belum terintegrasi; koordinasi lintas sektor lemah	Kualitas hidup menurun; penyakit berbasis lingkungan meningkat; rantai pasok perikanan terganggu; permukiman tidak layak; risiko banjir & rob tinggi; layanan dasar tidak tercapai; berkurangnya daya tarik investasi & wisata

Berdasarkan hasil analisis isu strategis yang mencakup tiga klaster utama—yakni isu sosial–ekonomi pesisir, isu ekologi dan sumber daya alam, serta isu sanitasi dan infrastruktur—terlihat bahwa tantangan pembangunan pesisir Kabupaten Batang bersifat kompleks, multidimensional, dan saling berkaitan erat. Permasalahan yang muncul tidak berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi sehingga tidak dapat ditangani secara sektoral yang terfragmentasi. Sebaliknya, dibutuhkan pendekatan terpadu yang mampu menghubungkan intervensi sosial, ekonomi, ekologis, serta tata kelola untuk memperkuat fondasi pembangunan pesisir yang berkelanjutan.

Isu sosial–ekonomi pesisir menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan UMKM dan ekonomi biru, serta



pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengurangi kemiskinan struktural dan ketergantungan pada sektor perikanan tradisional yang rentan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi pasar. Kerentanan ini diperparah oleh rendahnya pendidikan, terbatasnya akses modal, hingga belum optimalnya kelembagaan nelayan dan kelompok usaha. Pada saat yang sama, isu ekologi dan sumber daya alam mengungkap urgensi pemulihan ekosistem pesisir yang terdegradasi akibat abrasi, rob, sedimentasi muara, pencemaran, dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Ketiadaan pengawasan yang kuat serta lemahnya koordinasi lintas sektor menyebabkan tekanan lingkungan terus meningkat, sementara perubahan iklim memperbesar risiko bencana dan menurunkan daya dukung lingkungan.

Sementara itu, isu sanitasi dan infrastruktur pesisir Kabupaten Batang menunjukkan tantangan yang tidak kalah signifikan, terutama terkait layanan air bersih, pengelolaan limbah, sanitasi lingkungan, dan keberadaan permukiman kumuh yang rentan terhadap banjir rob dan pencemaran. Infrastruktur pendukung seperti drainase, sarana perikanan, dan fasilitas dasar belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika pesisir dan peningkatan risiko iklim. Oleh karena itu, upaya pembangunan pesisir Kabupaten Batang memerlukan strategi terintegrasi yang menggabungkan peningkatan kualitas layanan dasar, penataan ruang pesisir, rehabilitasi ekologis, modernisasi infrastruktur adaptif, serta penguatan tata kelola yang kolaboratif.

5.2. Rencana Kegiatan

Hasil analisis tersebut di atas memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan rencana aksi yang lebih terarah, terukur, dan responsif terhadap



akar permasalahan. Rencana aksi disusun tidak hanya untuk mengatasi dampak jangka pendek, tetapi juga untuk memperkuat fondasi ketahanan wilayah pesisir dalam jangka panjang. Penyusunan rencana aksi dilakukan dengan mengacu pada visi, misi, dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Batang 2025–2029, serta mempertimbangkan kebutuhan akan integrasi lintas sektor dan sinergi antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, rencana aksi berikut dirancang sebagai instrumen implementatif yang mampu menjawab isu-isu strategis secara komprehensif, memperkuat tata kelola pesisir yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan keberlanjutan ekosistem pesisir.



Tabel 11. Isu-isu Sumber Daya Pesisir dan Lingkungan

Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
Alih Fungsi Lahan	Mengendalikan alih fungsi lahan produktif dan kawasan lindung.	Laju konversi lahan pertanian dan hutan berkurang sebesar 50% dalam 5 tahun.	Penguatan regulasi tata ruang dan penegakan hukum (law enforcement).	1. Revisi & sosialisasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 2. Peningkatan pengawasan & patroli di kawasan rawan. 3. Pemberian insentif bagi pemilik lahan produktif. 4. Restorasi kawasan pesisir dengan kegiatan	Perda RTRW baru disahkan; Terlaksananya 24 kali patroli dalam setahun; 100 petani menerima insentif. 50.000 bibit mangrove tertanam dan hidup Ditetapkan kawasan perlindungan mangrove Terbentuk laboratorium mangrove di Desa Kuripan	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pertanian & Kehutanan, BPN, Satpol PP, Aparat Penegak Hukum. Bhimasena Power Indonesia.	Kawasan penyangga, lahan pertanian produktif, sempadan sungai.		2026-2027	APBD, APBN, CSR

Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
				penanaman pohon pada tanah negara atau kas desa 5. Pengembangan laboratorium mangrove di Desa Kuripan 6. Penetapan kawasan konservasi mangrove & kawasan pesisir						
Polusi Sampah Plastik	Mengurangi volume sampah plastik yang masuk ke TPA dan	Volume sampah plastik berkurang 30% dari baseline tahun 2025.	Penerapan ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah berbasis sumber.	1. Pembangunan pusat daur ulang/Bank Sampah/TPS3R di setiap desa dan kecamatan.	5 pusat daur ulang baru beroperasi; 10 TPS3R terbangun dan beroperasi; 70% populasi target terpapar kampanye; 1.000	Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Swasta/Industri, Komunitas Peduli	Area pemukiman, pasar, pusat perbelanjaan, dan pesisir.		2026-2030	APBD, Dana Desa, CSR



Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
	lingkungan (sungai, laut).			2. Kampanye masif "Kurangi Plastik Sekali Pakai". 3. Program "Tukar Sampah dengan Sembako". 4. Pemasangan <i>trash trap</i> di sungai	KK berpartisipasi dalam program penukaran. <i>5 trash trap</i> terpasang di 5 sungai	Lingkungan, PKK, Sekolah.				
Kesadaran Pemerintah, Usaha, dan Masyarakat	Meningkatnya kesadaran & kepedulian semua pihak terhadap isu lingkungan.	Peningkatan partisipasi publik dalam program lingkungan sebesar 40%; Adanya kebijakan pro-lingkungan dari 50% pelaku usaha.	Edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi multi-pihak secara berkelanjutan.	1. Workshop & seminar lingkungan untuk masyarakat, aparat pemerintah & pelaku usaha. 2. Integrasi pendidikan lingkungan	10 workshop terselenggara; 41 sekolah mengadopsi kurikulum PLH (sekolah adiwiyata); 40 desa/kelurahan mengikuti lomba .	Semua instansi pemerintah, KADIN, Asosiasi Pengusaha, Sekolah, Media Massa, LSM/NGO.	Seluruh wilayah administratif (Kabupaten/Kota).		Sepanjang Tahun 2026	APBD, Swadaya, Sponsor

Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
				hidup (PLH) dalam kurikulum sekolah - Sekolah Adiwiyata (PAUD - Universitas). 3. Lomba kampung bersih & hijau/ PROKLIM (program kampung iklim). 4. Pemasangan papan himbauan dan larangan terkait perlindungan pesisir. 5. Penggunaan teknologi	papan himbauan dan larangan terpasang di 20 desa pesisir di Batang Kampanye lingkungan dilakukan secara masif di menggunakan teknologi media informasi					



Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
				media informasi untuk kampanye lingkungan.						
Penebangan Liar dan Limbah	Menurunnya aktivitas penebangan liar dan pembuangan limbah ilegal.	Angka deforestasi akibat penebangan liar turun 60%; 80% industri memiliki dan mengoperasikan IPAL yang standar.	Peningkatan pengawasan terpadu dan penegakan aturan yang tegas.	1. Patroli hutan gabungan (Polhut, TNI/Polri, Masyarakat). 2. Audit dan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan industri. 3. Pemasangan CCTV di titik rawan pembuangan limbah.	50 patroli gabungan/tahun; 100 industri diaudit; 20 CCTV terpasang dan berfungsi.	Dinas Kehutanan, DLH, Gakkum KLHK, TNI/Polri, Masyarakat Peduli Api & Hutan.	Kawasan hutan lindung, taman nasional, kawasan industri, Daerah Aliran Sungai (DAS).		2026-2028	APBN, APBD Provinsi
Penegakan Hukum	Terwujudnya efek jera bagi	Minimal 75% kasus	Peningkatan kapasitas	1. Pelatihan khusus bagi	100 aparat terlatih; 1 Satgas	Kepolisian, Kejaksaan,	Wilayah yurisdiksi hukum terkait.		2026-2027	APBN

Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
	pelaku kejahatan lingkungan.	kejahatan lingkungan yang dilaporkan berhasil diproses hingga ke pengadilan.	aparatus penegak hukum dan sinkronisasi peraturan.	penyidik, jaksa, dan hakim terkait hukum lingkungan. 2. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Kejahatan Lingkungan. 3. Membuka hotline pengaduan 24 jam. 4. Pemberian sanksi bagi usaha yang membuang limbah tidak sesuai dengan perizinan. 5. Pemberian sanksi bagi	terbentuk dan operasional; 200 laporan masyarakat ditindaklanjuti.	Pengadilan, Gakkum KLHK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).				

Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
				industri yang mengambil air tanah tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan izin.						
Berdasarkan Konsultasi Publik										
Kerusakan Mangrove				1. Pengembangan laboratorium mangrove di Desa Kuripan. 2. Penetapan kawasan konservasi mangrove & kawasan pesisir 3. Penyusunan Perdes perlindungan kawasan pesisir	1 Laboratorium Mangrove terbentuk Perbup Penetapan Kawasan mangrove dan kawasan pesisir 8 Perdes Perlindungan kawasan pesisir	DLH				

Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
Sedimentasi Muara				1. Mengembalikan kawasan sempadan pantai/ muara sungai sesuai dengan peruntukannya	Xx % pengurangan bangunan di sempadan pantai	DPUPR				
Pencemaran industri & domestik				1. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat. 2. Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan	1. Lima laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	DLH				APBD



Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
				lingkungan hidup. 3. Pemasangan CCTV di titik rawan pembuangan air limbah. 4. Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin pphl diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota. 5. Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan	2. Seratus sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan. 3. Tbd. 4. Persentase pemberian rekomendasi izin lingkungan per tahun Persentase dokumen ukl-upl yang diselesaikan (25 per tahun). 5. Dua puluh lima dokumen hasil					

Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
				limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	koordinasi & sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan , pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pemda kabupaten/ko ta serta pelaksanaan					



Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
					pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya.					
Kualitas (dan kuantitas) Air Menurun				1. Pengukuran kualitas air sungai secara berkala. 2. Penyusunan dokumen daya dukung daya tampung lingkungan hidup (fokus air). 3. Mendorong penggunaan air desalinasi	2 kali setahun (max. 3 titik - hulu, tengah - hilir) di setiap sampling badan sungai). 1 dokumen tersusun dan dipublikasikan. Volume air desalinasi yang	DLH, PSDA/PU Pengairan, BBWS				APBD, APBN, CSR

Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
				untuk air baku industri	digunakan cukup untuk industri					
Degradasi Habitat				1. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk 50 tahun kedepan (ditinjau setiap 5 tahun). 2. Transplantasi terumbu karang. 3. Pembuatan fish apartment	1 Perda disusun dan diimplementasikan 3 lokasi (Karang Sebang, Karang Kretek, Karang Mahesa) 4 lokasi ((Karang Sebang, Karang Kretek, Karang Mahesa, kec Gringsing)	DLH	Seluruh Kabupaten termasuk Kawasan Konservasi Laut Daerah		2025 - 2026	APBD



Tabel 12. Isu-isu Infrastruktur dan Sanitasi

Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
Pemukiman Kumuh	Mengurangi luas kawasan pemukiman kumuh sebesar 50%	Peningkatan kualitas hunian; Tersedianya sarana & prasarana dasar (air bersih, sanitasi, jalan).	Penataan kawasan melalui program perbaikan kampung (Kampung Improvement Program) dan penyediaan hunian layak.	1. Pembangunan/perbaikan jalan lingkungan (paving block). 2. Pembangunan MCK komunal & jaringan air bersih 3. Program bedah rumah untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).	1000 meter jalan lingkungan diperbaiki; 5 unit MCK baru terbangun; 50 unit rumah berhasil direnovasi.	Dinas Perkimtan, Dinas PUPR, Pemerintah Desa/Kelurahan, Swadaya Masyarakat, CSR Perusahaan.	Kawasan kumuh teridentifikasi (Contoh: RW 01, RW 05)		2026-2027	APBN (Program KOTAKU), APBD, CSR
Rob (Banjir Laut Pasang)	Mengurangi dampak genangan rob di area pemukiman dan produktif.	Frekuensi dan tinggi genangan rob berkurang 70%; Aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu saat pasang.	Pembangunan infrastruktur pengendali rob dan adaptasi masyarakat.	1. Pembangunan tanggul laut atau tanggul penahan rob. 2. Peninggian jalan utama yang terdampak.	500 meter tanggul terbangun; 1 km jalan ditinggikan; 80% warga mengetahui sistem	Kementerian PUPR (BBWS), Dinas PUPR Provinsi/Kabupaten, BMKG, BPBD, Masyarakat.	Garis Pantai/Area Pesisir Terdampak		2026-2028	APBN, APBD Provinsi

Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
				3. Sosialisasi kalender pasang surut dan sistem peringatan dini.	peringatan dini.					
Abrasi	Melindungi garis pantai dari laju abrasi.	Laju abrasi berkurang hingga 0.5 meter/tahun; Ekosistem pesisir (mangrove) kembali pulih.	Kombinasi pendekatan struktural (hard structure) dan non-struktural (soft structure).	1. Penanaman 10.000 bibit mangrove di sepanjang pantai. 2. Pembangunan pemecah ombak (breakwater) di titik kritis. 3. Pembentukan kelompok masyarakat peduli mangrove.	5 hektar lahan mangrove baru tertanam; 2 unit breakwater terpasang; 1 kelompok peduli lingkungan aktif.	Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan & Perikanan, Komunitas Lingkungan, Akademisi.	Pesisir Utara Kabupaten		2026-2027	APBN, APBD, Dana Desa, Dana Hibah Lingkungan
Kesadaran Masyarakat Terhadap	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam	60% rumah tangga melakukan pemilahan sampah dari	Edukasi masif dan fasilitasi sarana pengelolaan sampah	4. 1. Program Gerakan Pilah Sampah dari Rumah (GPS). 2. Pembangunan	10 Bank Sampah baru beroperasi; 500 rumah tangga	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa/Kelurahan	Seluruh Wilayah Desa/Kelurahan		Sepanjang Tahun 2026	APBD, Dana Desa, Swadaya Masyarakat

Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
Sampah Rendah	pengelolaan sampah.	rumah; Volume sampah yang masuk ke TPA berkurang 20%.	berbasis sumber.	Bank Sampah di setiap RW. 3. Kampanye "Zero Waste" di sekolah dan ruang publik. 4. Pembuatan TPS3R di setiap desa.	menjadi nasabah aktif; Terlaksananya 10 acara kampanye.	, Kader Lingkungan (PKK, Karang Taruna), Sekolah.				
Drainase Buruk	Terwujudnya sistem drainase yang berfungsi optimal untuk mencegah genangan/banjir	Berkurangnya titik genangan air sebesar 80% saat hujan intensitas sedang.	Normalisasi dan perbaikan jaringan drainase primer dan sekunder.	1. Pengerukan sedimen di saluran drainase utama. 2. Perbaikan/pembangunan saluran drainase lingkungan yang rusak. 3. Gerakan "Jumat Bersih" fokus pada	2 km saluran utama ternormalisasi; 500 meter saluran lingkungan diperbaiki; Program kerja bakti berjalan rutin setiap bulan.	Dinas PUPR, UPTD Kebersihan, Pemerintah Desa/Kelurahan, RT/RW, Masyarakat.	Titik-titik rawan genangan		Mei-Oktober 2026 (sebelum musim hujan)	APBD Kabupaten, Dana Desa

Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
				pembersihan got/saluran.						
Berdasarkan Konsultasi Publik										
Limbah meningkat, sanitasi buruk, dan MCK terbatas	Meningkatnya pengembangan infrastruktur air limbah	- Peningkatan persentase pengembangan infrastruktur air limbah. - Peningkatan akses sanitasi yang layak	Pembangunan SPALDS atau SPALDT	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 3. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah	- Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (M^3/Hari). - Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan	Dinas PUPR, DPRKP, dan DISPERAKIM Jateng, dan Kementerian PKP.	Permukiman pesisir		2026-2030	APBD Kabupaten dan Provinsi,, APBN



Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
				Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu. 4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). 5. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah	Tertentu yang dibangun (M ³ /Hari). - Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyelenggara). - Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem					

Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
				Domestik (SPALD).	Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen). - Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun ($M\hat{A}^3$/Hari). - Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik					



Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
					(SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun ($M\hat{A}^3/\text{Hari}$). - Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara ra Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyelengg ara).					

Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
					- Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen).					
Pemukiman Kumuh	Mengurangi luas kawasan pemukiman kumuh secara bertahap	Penurunan persentase luas kawasan pemukiman kumuh secara bertahap	Pembangunan kawasan pemukiman yang layak	1. Program Kawasan Permukiman 2. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	-Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani -Persentase rumah tidak layak huni -Persentase Penyediaan Rumah bagi korban	DPRKP	Kawasan permukiman pesisir		2026-2030	APBD Kabupaten dan Provinsi,, APBN

Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
				3. Program Pengembangan Perumahan 4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU.	bencana atau terdampak program pemerintah kabupaten -Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU					
Kekurangan air bersih	Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan akses aman air minum	Peningkatan persentase kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan akses aman air minum	Penyediaan Jaringan perpipaan air minum di permukiman pesisir	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum aman Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM, Pamsimas	Kawasan Permukiman Pesisir		2026-2030	APBD dan APBN

Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
				di Daerah Kabupaten/Kota . 3. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). 4. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan. 5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem	Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik) Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga). Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air					



Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
				Penyediaan Air Minum (SPAM).	Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen). Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen). Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang					

Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
					dibangun (Liter/Detik). Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga).					
Drainase tidak memadai	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Peningkatan persentase Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Merehabilitasi Sistem Drainase di Kawasan Pesisir	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	- Persentase saluran drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam kondisi baik (%) - Jumlah Sistem	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kawasan Permukiman Pesisir		2026-2030	APBD dan APBN



Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
					Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan) Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan) -Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem					

Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
					Drainase Perkotaan) - Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)					
Sampah meningkat	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sampah	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sampah	Pengelolaan sampah dari hulu ke hilir antara lain pemilahan sampah dari rumah tangga, pengelolaan sampah di	1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 2. Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS.	-Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit) -Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kawasan Permukiman Pesisir		2026-2030	APBD, APBN, CSR



Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
			tingkat desa/komunitas Sosialisasi kesadaran masyarakat Sirkuler ekonomi	3. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R.	dibangun (Ton/hari) -Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit). -Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari).					
Kerusakan jalan dan bangunan pesisir	Meningkatnya penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	Meningkatnya penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	Peningkatan kualitas dan dimensi jalan	1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). 2. Penyelenggaraan Jalan	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%). Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM).	Perkim, Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten di Kawasan Pesisir		2026-2030	APBD dan APBN

Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
				Kabupaten/Kota .	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter). Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter). Panjang jembatan yang dilebarkan (Meter). Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter). Panjang jembatan yang					



Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
					dibangun ((Meter). Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM); Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM); Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM); Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM);					

Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
					Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM); Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM); Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan); Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis					



Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
					Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)					
Pendangkalan muara	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Meningkatnya persentase sistem drainase perkotaan yang terpelihara	Normalisasi Muara Sungai.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	DPUPR	Muara Sungai		2026-2030	APBD APBN
Pelanggaran Tata Ruang	Meningkatnya kepatuhan terhadap	Peningkatan persentase kepatuhan	Upaya pengendalian	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase perwujudan	DPUPR	Kawasan Pesisir		2026-2030	APBD APBN

Isu Pokok (Dari Grafik)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
	rencana tata ruang	terhadap rencana tata ruang	pemanfaatan ruang		rencana tata ruang (%)					

Tabel 13. Isu-isu Sosial Ekonomi

Isu Pokok (Dari Gambar)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
Pemberdayaan Masyarakat	Terwujudnya masyarakat pesisir/pertanian yang mandiri, aktif, dan inovatif.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan; Meningkatnya jumlah wirausaha baru sebesar 20%.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM).	1. Pelatihan kewirausahaan dan manajemen keuangan. 2. Pembentukan & penguatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).	100 orang terlatih; 5 KUBE baru terbentuk dan aktif.	Pemda (Dinas Koperasi & UKM, Dinas Perikanan), Akademisi, Tokoh Masyarakat, Pelaku Usaha.	Desa/Kecamatan Target		Jan-Juni 2026	APBD, Dana Desa
Kesejahteraan Menurun	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.	Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat sebesar 15%; Penurunan angka	Diversifikasi ekonomi dan penciptaan sumber	1. Pengembangan desa wisata (ekowisata bahari/agrowisata). 2. Pelatihan	2 paket wisata baru diluncurkan; 10 produk olahan baru memiliki	Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan/Pertanian, Kelompok	Kawasan Pesisir/Pertanian		Maret-Des 2026	APBD, Kemenparekraf, CSR



Isu Pokok (Dari Gambar)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
		kemiskinan sebesar 5%.	pendapatan alternatif.	pengolahan produk turunan bernilai tambah.	kemasan standar.	Sadar Wisata (Pokdarwis), UMKM.				
Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Perikanan Tinggi	Terkendalinya alih fungsi lahan produktif.	Laju alih fungsi lahan berkurang hingga 10% per tahun; Luas lahan baku sawah/tambak tetap terjaga.	Penguatan regulasi tata ruang dan insentif lahan produktif.	1. Sosialisasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 2. Fasilitasi sertifikasi lahan pertanian/perikanan.	80% pemilik lahan memahami Perda RTRW; 50 hektar lahan tersertifikasi.	BPN, Dinas Tata Ruang, Dinas Pertanian/Perikanan, Pemilik Lahan.	Wilayah Kabupaten/Kota		Sepanjang Tahun 2026	APBD
Penurunan Produksi Perikanan dan Pertanian	Meningkatnya volume dan kualitas produksi perikanan dan pertanian.	Peningkatan total produksi tangkap/budidaya/panen sebesar 20% per tahun.	Intensifikasi dan penerapan teknologi budidaya/pengungkapan yang berkelanjutan.	1. Bantuan bibit unggul dan benih ikan berkualitas. 2. Penyuluhan dan pendampingan teknik budidaya modern/ramah lingkungan.	5 ton bibit/benih terdistribusi; 200 petani/nelayan menerapkan teknik baru.	Dinas Perikanan/Pertanian, PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), Akademisi (Fakultas Perikanan/Pertanian).	Sentra Produksi Perikanan/Pertanian		Musim Tanam/Tebat 2026	APBN (KKP/Kementerian), APBD

Isu Pokok (Dari Gambar)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
Rendahnya Teknologi Hasil Pengelolaan Hasil Perikanan	Meningkatnya adopsi teknologi pascapanen dan pengolahan hasil perikanan.	50% UMKM pengolahan ikan mengadopsi setidaknya satu teknologi baru.	Difusi teknologi tepat guna dan fasilitasi akses permodalan.	1. Demo & pelatihan alat pengolahan (misal: vacuum sealer, pengasap modern). 2. Fasilitasi kredit lunak untuk pembelian alat.	50 UMKM mengikuti pelatihan; 25 UMKM berhasil mengakses kredit alat.	Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi & UKM, Perbankan/Lembaga Keuangan, Akademisi.	Sentra UMKM Pengolahan Ikan		April-Okt 2026	APBD, Perbankan, CSR
Kontinuitas Produk UMKM	Terjaminnya kontinuitas pasokan bahan baku dan standarisasi produk UMKM.	90% UMKM mitra tidak mengalami putus pasokan bahan baku; 30% produk memiliki sertifikasi (PIRT/Halal).	Penguatan rantai pasok dari hulu ke hilir dan peningkatan standar mutu.	1. Membangun skema kemitraan antara nelayan/petani dengan UMKM. 2. Pendampingan untuk sertifikasi mutu produk (PIRT, Halal, BPOM).	10 kontrak kemitraan terbentuk; 15 produk UMKM mendapatkan nomor PIRT.	Asosiasi UMKM, Dinas Kesehatan, LPPOM MUI, Pelaku UMKM, Kelompok Tani/Nelayan.	Wilayah Kabupaten/Kota		Juni-Des 2026	APBD, Swadaya UMKM



Isu Pokok (Dari Gambar)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
			Penegakan Peraturan dan Pemberdayaan Perempuan	Sosialisasi dan penegakan batas usia pernikahan sesuai UU; Pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga muda.	Penurunan jumlah dispensasi pernikahan yang dikeluarkan Pengadilan Agama; Peningkatan persentase perempuan muda yang memiliki kegiatan ekonomi produktif.	DP3A, KUA/Pengadilan Agama, Dinas Koperasi & UMKM.	Seluruh Wilayah Pesisir.		Berkelanjutan	APBD

Berdasarkan Konsultasi Publik

Kemiskinan pesisir		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS (Penerima Pemerlu	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1. Program Keluarga Harapan 2. Program Layanan Puskesmas Desa	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial	Seluruh desa pesisir di Kab Batang	Akan mengacu pada Renstra	2026-2029	APBN, APBD Kab
--------------------	--	--	---	--	--	--------------	------------------------------------	---------------------------	-----------	----------------

Isu Pokok (Dari Gambar)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
		Kesejahteraan Sosial)		3. Program Penanganan Bencana	Jumlah masyarakat yang terlayani Jumlah masyarakat korban bencana yang terlayani			Dinas Sosial		
	Meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir	Meningkatnya ekonomi masyarakat pesisir melalui sektor perdagangan dan pariwisata	Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1. Pengelolaan destinasi wisata 2. Pembinaan destinasi wisata milik swasta	Jumlah kunjungan	Dinas Pariwisata	Kecamatan Batang, Kandeman, Tulis, Subah, Banyuputih, Gringsing	Akan mengacu pada Renstra Dinas Pariwisata	2026-2029	APBD Kab, CSR
Pendapatan nelayan fluktuatif	Peningkatan pendapatan nelayan melalui mata	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Pelatihan 2. Fasilitasi pemasaran	Capaian produksi pengolahan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kecamatan Batang, Kandeman, Tulis, Subah,	Akan mengacu pada Renstra	2026-2029	APBN, APBD Kab, CSR



Isu Pokok (Dari Gambar)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
	pencaharian alternatif (MPA)			3. Penerapan teknologi informasi	Persentase Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan		Banyuputih, Gringsing	Dinas Perikanan		
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1. Modernisasi alat tangkap nelayan 2. Penyediaan sarana dan prasarana penangkapan 3. Program Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)	Capaian produksi perikanan tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kecamatan Batang, Kandeman, Tulis, Subah, Banyuputih, Gringsing	Akan mengacu pada Renstra Dinas Perikanan	2026-2029	APBN, APBD Kab, CSR
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Program Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) 2. Sosialisasi/Pengenalan	Capaian produksi perikanan budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kecamatan Batang, Kandeman, Tulis, Subah, Banyuputih, Gringsing	Akan mengacu pada Renstra Dinas Perikanan	2026-2029	APBN, APBD Kab, CSR

Isu Pokok (Dari Gambar)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
				kegiatan budidaya ikan						
Ketergantungan pada pertanian tradisional	Kesejahteraan petani melalui peningkatan nilai tukar petani (NTP)	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rekayasa komoditas spesifik lokasi menggunakan teknologi smart farming	Nilai Tukar Petani	Dinas Pertanian	Kecamatan Batang, Kandeman, Tulis, Subah, Banyuputih, Gringsing	Akan mengacu pada Renstra Dinas Pertanian	2026-2029	APBN, APBD Kab, CSR
	Menurunkan tingkat kerawanan pangan masyarakat	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Pemanfaatan lahan pekarangan dan penggunaan teknologi smart farming (screen house, hidroponik)	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Dinas Pertanian	Kecamatan Batang, Kandeman, Tulis, Subah, Banyuputih, Gringsing	Akan mengacu pada Renstra Dinas Pertanian	2026-2029	APBN, APBD Kab, CSR
	Pemanfaatan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelatihan GHP & PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan)	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan Mutu Keamanan pangan	Dinas Pertanian	Kecamatan Batang, Kandeman, Tulis, Subah, Banyuputih, Gringsing	Akan mengacu pada Renstra Dinas Pertanian	2026-2029	APBN, APBD Kab, CSR



Isu Pokok (Dari Gambar)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
Ketergantungan pada perikanan tradisional	Meningkatkan pembudidayaan ikan	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Pengelolaan pembudidayaan ikan 2. Penyediaan sarana dan prasarana budidaya ikan 3. Pengembangan kapasitas pembudidayaan ikan 4. Monitoring kesehatan ikan 5. Fasilitas bantuan, pendanaan dan kemitraan usaha	Capaian produksi perikanan budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kecamatan Batang, Kandeman, Tulis, Subah, Banyuputih, Gringsing	Akan mengacu pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan	2026-2029	APBD Kab
Rendahnya keterampilan & literasi ekonomi	Tergabung dalam UMKM									

Isu Pokok (Dari Gambar)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
Stunting	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Menurunkan prevalensi stunting, wasting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. ANC terpadu minimal 6x selama kehamilan	Persentase penurunan kasus kematian ibu	Dinas Kesehatan				APBD Kabupaten
		Meningkatkan cakupan pemberian ASI Eksklusif		2. Pemberian ASI Eksklusif	Jumlah Kematian Bayi					
		Meningkatkan cakupan pemberian MPASI usia 0-24 bulan		3. Pemantauan tumbuh kembang secara rutin	Prevalensi wasting balita					
				4. Pemberian MPASI (makanan pendamping ASI) berkualitas						
				5. Pemberian makanan tambahan (PMT)						
				6. Pemulihan balita gizi kurang, bb						



Isu Pokok (Dari Gambar)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
	Pencegahan dan Penurunan Stunting	Tidak ada kasus stunting baru	Program Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	kurang dan bb tidak naik						
				Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk mendampingi keluarga berisiko	Persentase keluarga berisiko stunting (KRS) yang terdampingi Jumlah target sasaran tim pendamping yang terdampingi (targetnya 30 sasaran per tim, per bulan)	DP3AP2KB (BKKBN), Dinas Kesehatan, Kader PKK				Dana BOKB, DAK Dana Pusat (melalui APBD)
			Program MBG	MBG dengan sasaran B3 (Bumil, Ibu Nifas, Balita non PAUD) - 10% dari tiap	Tersedianya data sasaran B3					

Isu Pokok (Dari Gambar)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasila n Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
				sasaran SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)	SPPG mampu menyediakan 10% dari sasaran Jumlah MBG terdistribusi ke sasaran B3					
	Pencegahan dan Penurunan Stunting	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Program GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakat kan Makan Ikan)	1. Memberi bantuan makanan olahan ikan pada balita stunting, ibu hamil 2. Sosialisasi dan kampanye GEMARIKAN	Angka konsumsi ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan, PKK Kab Batang, Dinas Kesehatan DP3AP2KB				APBD Kab
Pendidikan rendah	Anak mendapatkan akses Pendidikan	Meningkatnya pelayanan pengelolaan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Sekolah Gratis, BOS, Beasiswa	Angka Partisipasi Sekolah APS	Dinas Pendidikan				APBN, APBD Kab



Isu Pokok (Dari Gambar)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelatihan Pendidikan Karakter untuk Guru	Prosentase guru memiliki sertifikat pendidik	Dinas Pendidikan				APBN
UMKM pesisir lemah	UMKM naik kelas dengan jangkauan pemasaran yang lebih luas dan dilengkapi dengan legalitas produk	Omset atau nilai penjualan meningkat	Program pelatihan kewirausahaan	1. Pelatihan pengemasan 2. Pelatihan Manajemen 3. Pelatihan Pemasaran	Jumlah penjualan UMKM Jumlah UMKM yang bermitra dengan toko modern Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Kecamatan Batang, Kandeman, Tulis, Subah, Banyuputih, Gringsing	Akan mengacu pada Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	2026-2029	APBD Kab
		Peningkatan nilai tambah ekonomi	Program Pelatihan Pemasaran	1. Pelatihan Pemasaran	Omzet Jangkauan pemasaran	Dinas Pariwisata		Akan mengacu pada	2026-2029	APBD Kab

Isu Pokok (Dari Gambar)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
		bagi pelaku ekonomi kreatif Perlindungan hukum bagi produk ekonomi kreatif	Prgram Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Merek Produk) Program Fasilitasi pameran	2. Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (Hak Merek) 3. Fasilitasi pameran	Jumlah Hak Merek yang dimiliki oleh pelaku ekonomi kreatif			Renstra Dinas Pariwisata		
		Pelaku usaha mendapatkan legalitas atas produk PIRT dan mendapatkan wawasan keamanan pangan bagi UMKM makanan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1. Penyuluhan Keamanan Pangan 2. Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT,	Jumlah UMKM dengan ijin PIRT	Dinas Kesehatan		Akan mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan	2026-2029	APBD Kab dan DAK BPOM



Isu Pokok (Dari Gambar)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
		industri rumah tangga		serta tindak lanjut pengawasan dan penyediaan tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga.						
Minim inovasi & teknologi	Tergabung dengan isu lainnya misalnya modernisasi alat tangkap → isu pendapatan nelayan fluktuatif									
Regenerasi pelaku usaha rendah	Terciptanya calon wirausaha baru	Jumlah wirausaha baru meningkat	Program Pelatihan Kerja dan	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi	Jumlah Tenaga Kerja Mandiri/	Disnaker			2025-2029	APBD Kabupaten

Isu Pokok (Dari Gambar)	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasila n Kegiatan	Pihak Terlibat	Lokasi	Estimasi Anggaran	Periode	Sumber Pendanaan
			Produktivitas Tenaga Kerja	Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Wirausaha baru					



BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

6.1 Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

1. Berbasis Kinerja (SMART):

Pemantauan dan evaluasi didasarkan pada prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*). Setiap indikator keberhasilan harus dirumuskan secara jelas, terukur secara kuantitatif, realistis dalam pencapaiannya, relevan dengan tujuan program, dan memiliki kerangka waktu implementasi yang pasti, sehingga memudahkan penentuan capaian dan *output* program.

2. Inklusivitas dan Responsivitas Sosial:

Proses pemantauan dijamin bersifat inklusif, memastikan partisipasi dan representasi penuh dari kelompok rentan dan marjinal, termasuk perempuan, pemuda, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas. Masukan dan perspektif mereka harus diintegrasikan dalam evaluasi akhir, sehingga menjamin bahwa kebijakan dan program yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan keadilan sosial.

3. Transparansi dan Akuntabilitas Publik:

Mekanisme pemantauan dilaksanakan secara terbuka (*open governance*), melibatkan spektrum luas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah dan OPD teknis hingga akademisi, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. Proses ini menuntut pelaporan yang mudah diakses oleh publik, sehingga meningkatkan transparansi dan memperkuat akuntabilitas kinerja program.

4. Siklus Berkala dan Keterpaduan Jangka Panjang:

Evaluasi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, dengan fokus pada pemantauan tahunan untuk koreksi jangka pendek dan evaluasi komprehensif setiap lima tahun (sesuai siklus RPJMD dan RPJPD). Pendekatan ini memastikan bahwa program selalu relevan, adaptif, dan selaras dengan visi pembangunan daerah jangka menengah dan panjang.

6.2 Komponen Pemantauan dan Evaluasi

1. Kinerja Indikator Keberhasilan

Secara spesifik untuk setiap tujuan pengelolaan dan kegiatan program. Indikator ini dirancang untuk memastikan capaian program dapat diverifikasi secara empiris. Misalnya, keberhasilan ekologis diukur melalui luas area mangrove yang berhasil direhabilitasi dan berkurangnya garis pantai yang terdampak abrasi. Sementara itu, capaian sosial-ekonomi diukur melalui peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan. Selain itu, komitmen terhadap keadilan dievaluasi melalui persentase partisipasi kelompok rentan dalam forum pengambilan keputusan, menjamin bahwa manfaat program tidak hanya bersifat teknis tetapi juga inklusif.

2. Pelibatan Pihak

Sistem pemantauan dan evaluasi dirancang secara inklusif dengan mengedepankan pendekatan lintas sektor. Mekanisme ini mengintegrasikan kolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait—seperti DLH, Dinas PU, Disperkim, dan Bappeda—beserta aparat pemerintah desa, lembaga konservasi, dan unsur akademisi dari perguruan tinggi. Partisipasi publik diperluas dengan melibatkan



organisasi masyarakat sipil serta komunitas pesisir guna menjamin representasi yang komprehensif. Secara khusus, kerangka kerja ini memastikan keterlibatan aktif perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal dalam setiap tahapan kegiatan. Peran mereka dioptimalkan sebagai penyedia data, pemantau independen, maupun evaluator partisipatif demi terwujudnya akuntabilitas sosial yang substansial.

3. Tata Waktu Pelaksanaan

Pemantauan dan evaluasi program disusun dalam siklus yang berkala. Pemantauan rutin dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun untuk mengukur progres pencapaian kegiatan dan mengidentifikasi penyesuaian yang diperlukan secara cepat. Sementara itu, evaluasi komprehensif dijadwalkan pada pertengahan periode (*mid-term review*) dan akhir periode (*end-term review*), selaras dengan siklus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Seluruh hasil pemantauan dan evaluasi ini dikompilasi dalam laporan resmi yang transparan, menjadi dasar utama untuk perbaikan kebijakan, dan wajib disajikan dalam forum konsultasi publik untuk menerima masukan langsung dari masyarakat.

6.3 Rencana Pemantauan dan Evaluasi per Tujuan

Rencana pemantauan dan evaluasi dalam Masterplan Pengelolaan Pesisir Kabupaten Batang dirancang secara sistematis dengan memanfaatkan hasil analisis isu strategis, perumusan tujuan pengelolaan, serta strategi dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk memastikan keterhubungan yang jelas antara permasalahan, tujuan, dan tindakan yang dilakukan, rencana pemantauan akan disusun bersama



oleh kelembagaan multistakeholder (PMO) berdasarkan rencana aksi pada Tabel 7 hingga Tabel 9 pada Bab V.





Supported by
 **Norway**